

IMPLEMENTASI PROGRAM CHSE (*CLEANLINESS, HEALTHY, SAFETY, ENVIRONMENT SUSTAINABILITY*) SEBAGAI WUJUD PEMENUHAN HAK WISATAWAN DALAM ERA NEW NORMAL DI DESTINASI WISATA BUGIS WATER PARK KOTA MAKASSAR

SKRIPSI



Oleh :

MUH. ALIF TAUFIK

105611123118

**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

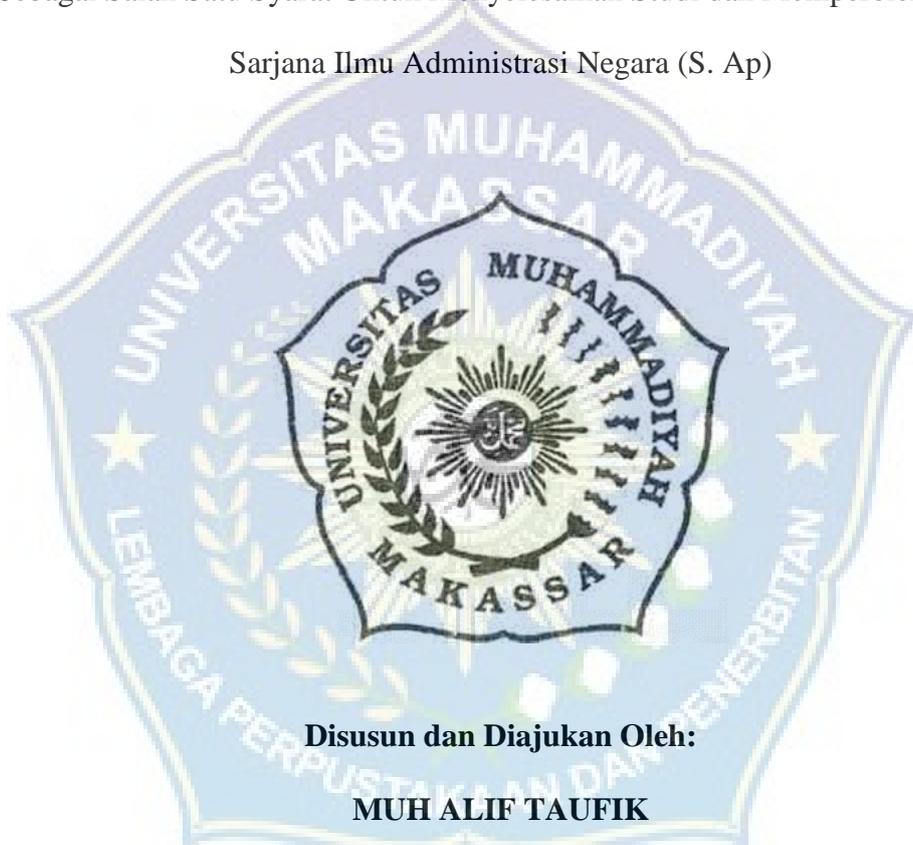
2023

IMPLEMENTASI PROGRAM CHSE (*CLEANLINESS, HEALTHY, SAFETY, ENVIRONMENT SUSTAINABILITY*) SEBAGAI WUJUD PEMENUHAN HAK WISATAWAN DALAM ERA NEW NORMAL DI DESTINASI WISATA BUGIS WATER PARK KOTA MAKASSAR

SKRIPSI

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Menyelesaikan Studi dan Memperoleh Gelar

Sarjana Ilmu Administrasi Negara (S. Ap)



Disusun dan Diajukan Oleh:

MUH ALIF TAUFIK

Nomor Stambuk: 105611 1231 18

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2023

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Implementasi Program CHSE (Cleanliness, Healty, Savety, Environment Sustainability) seabagi wujud pemenuhan hak wisatawan dalam era new normal di Destinasi wisata Kota Makasar

Nama Mahasiswa : Muh. Alif Taufik

Nomor Induk Mahasiswa : 105611123118

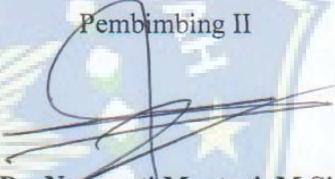
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Menyetujui:

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Hj. Fatmawati, M.Si


Dr. Naryanti Mustari, M.Si

Mengetahui

Dekan

Ketua Program Studi


Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si
NBM: 730727


Dr. Nur Wahid, S.Sos., M.Si
NBM: 99174

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Implementasi Program CHSE (Cleanliness, Healty, Savety, Environment Sustainability) seabagi wujud pemenuhan hak wisatawan dalam era new normal di Destinasi wisata Kota Makasar

Nama Mahasiswa : Muh. Alif Taufik

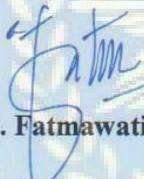
Nomor Induk Mahasiswa : 105611123118

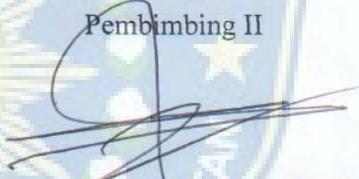
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Menyetujui:

Pembimbing I

Pembimbing II

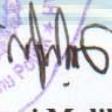

Dr. Hj. Fatmawati, M.Si

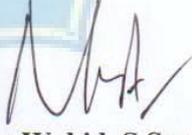

Dr. Naryanti Mustari, M.Si

Mengetahui

Dekan

Ketua Program Studi


Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si
NBM: 730727


Dr. Nur Wahid, S.Sos., M.Si
NBM: 99174

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Muh. Alif Taufik

Nomor Induk Mahasiswa : 105611123118

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Menyatakan bahwa benar skripsi ini adalah karya saya sendiri dan bukan hasil plagiasi dari sumber lain. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik dan pemberian sanksi lainnya sesuai aturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 22 November 2023

Yang Menyatakan,

Muh. Alif Taufik

IMPLEMENTASI PROGRAM CHSE (*CLEANLINESS, HEALTHY, SAFETY, ENVIRONMENT SUSTAINABILITY*) SEBAGAI WUJUD PEMENUHAN HAK WISATAWAN DALAM ERA NEW NORMAL DI DESTINASI WISATA BUGIS WATER PARK KOTA MAKASSAR

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Implementasi dan apa dampak dari pengaruh Program CHSE sebagai wujud pemenuhan hak wisatawan dalam era new normal di destinasi wisata Kota Makassar yang di fokuskan di Bugis Water Park. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dan didukung data sekunder. Jenis data yang digunakan adalah data primer di peroleh dari hasil wawancara dan data sekunder di peroleh dari pengolahan data dan observasi. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Pemeriksaan keabsahan data dengan teknik trigulasi data. Teknik analisis data dilakukan secara induktif meliputi data reduction (reduksi data), data display (penyajian data), dan pengambilan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi Program Program CHSE sebagai wujud pemenuhan hak wisatawan dalam era new normal di destinasi wisata Kota Makassar telah di laksanakan cukup baik terkhususnya Bugis Water Park. Hambatan yang di alami Bugis Water Park sebagai salah satu sampel penulis adalah kurangnya komunikasi dengan sebagian pengunjung sehingga sebagian pengunjung merasa sikap para pelaksana terlalu fokus pada penerapan CHSE tapi tidak terlalu banyak berkomunikasi dengan pengunjung agar pengunjung merasa tidak khawatir.

Kata Kunci : Implementasi, CHSE

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

“Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh”

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas berkat, rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Implementasi Program CHSE (Cleanliness, Healty, Safety, Environtment Sustainability) Sebagai Wujud Pemenuhan Hak Wisatawan Dalam Era New Normal Di Destinasi Wisata Bugis Water Park Kota Makassar”**. Shalawat serta salam tetap tercurah kepada Nabi junjungan kita yakni Nabi besar Muhammad SAW.

Skripsi yang penulis buat ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan program Sarjana (SI) pada fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.

Penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya serta salam penuh hormat dengan segenap cinta kepada orang tua penulis Ayahanda H. Mursalim S,H dan Ibunda H. Hamina yang senantiasa memberikan harapan, semangat, perhatian, kasih sayang dan doa tulus tanpa pamrih, yang senantiasa mendukung dan memberikan semangat hingga akhir studi ini. Dan seluruh keluarga besar atas segala pengorbanan, dukungan dan doa restu yang telah diberikan demi keberhasilan penulis dalam menuntut ilmu. Semoga apa yang telah mereka berikan kepada penulis menjadi ibadah dan cahaya penerang kehidupan di dunia dan akhirat.

Begitu pula penghargaan yang stinggi-tingginya dan ucapan terima kasih disampaikan kepada:

1. Bapak Prof. DR. H. Ambo Asse, M.Ag selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Ibu Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Bapak Dr. Nur Wahid, S.Sos., M.Si., selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara.
4. Ibu Dr. Hj. Fatmawati, M.Si selaku Pembimbing I dan Ibu Dr. Nuryanti Mustari, M.Si selaku Pembimbing II yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan ilmunya dalam membimbing dan mengarahkan Penulis dengan baik sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
5. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen yang telah memberikan ilmunya kepada penulis dan seluruh Staff Pegawai di ruang lingkup Fakultas Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
6. Segenap Pemerintah Daerah Kota Makassar terkhususnya Dinas Pariwisata Kota Makassar dan Keluarga Bugis Water Park Makassar serta seluruh informan yang telah menerima, membantu dan memberikan arahan kepada penulis dalam melaksanakan penelitian.
7. Adik dan Kakak ke 4 Saya, Winda Citra Lestari dan Hilda Puspa Dewi telah membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Sahabat saya, Asri dan Surya yang senantiasa memberikan bantuan, dukungan dan motivasi dalam penyusunan skripsi ini.
9. Rekan-rekan seperjuangan Angkatan 2018 Ilmu Administrasi Negara

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah
Makassar.

10. Serta yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan
dukungan dan doa dalam penyusunan skripsi ini.

Mudah-mudahan skripsi yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi semua
pihak utamanya kepada Almamater Kampus Biru Universitas Muhammadiyah
Makassar.

Billahi fii Sabilil Haq, Fastabiqul Khairat, Wassalamu 'alaikum Wr.Wb.

Makassar, 22 November 2023

Yang Menyatakan,

Muh. Alif Taufik

NIM. 105611123118



DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	ii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	ix
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	6
1.3. Tujuan Penelitian.....	6
1.4. Manfaat Penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1. Penelitian terdahulu	8
2.2. Teori dan Konsep	11
2.3. Kerangka Pikir.....	24
2.4. Fokus Penelitian	25
2.5. Deskripsi fokus penelitian	25
BAB III	29
METODE PENELITIAN	29
3.1. Waktu dan lokasi	29
3.2. Jenis dan Tipe penelitian	29
3.3. Informan dan teknik pengumpulannya.....	29
3.4. Teknik pengumpulan data	30
3.5. Teknik anáalisis data	31
3.6. Teknik pengesahan data	33
BAB IV	35
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	35
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian	35
4.1.1 Letak Geografis Kota Makassar	35
4.1.2 Visi Misi Dinas Pariwisata Kota Makassar	36

4.1.3	Profil Singkat Bugis Water Park.....	37
4.1.4	Visi Misi Dan Tujuan Bugis Water Park.....	38
4.1.6	Tujuan CHSE.....	39
4.1.7	Struktur Organisasi Bugis Water Park.....	39
4.1.8	Tugas Pokok Dan Fungsi.....	39
4.2	Hasil Penelitian.....	41
4.2.1	Analisis standar dan sasaran kebijakan CHSE di Bugis Water Park..	41
4.2.2	Analisis Sumber Daya yang ada Di Bugis Water Park Sebagai poin penting dalam pengimplementasian CHSE.....	47
4.2.3	Analisis Sikap Para Pelaksana CHSE di Bugis Water Park	50
4.2.4	Analisis Karakteristik Bugis Water Park sebagai Organisasi Pelaksana	52
4.2.5	Analisis Komunikasi Antar Organisasi Dinas Pariwisata Dengan Bugis Water Park dan Aktifitas Pelaksana program CHSE	54
4.2.6	Analisis Lingkungan Sosial yang ada di Bugis Water Park	55
4.3	Pembahasan	57
4.3.1	Analisis standar dan sasaran kebijakan CHSE di Bugis Water Park..	57
4.3.2	Analisis Sumber Daya yang ada Di Bugis Water Park sebagai poin penting pengimplementasian CHSE.....	58
4.3.3	Analisis Sikap Para Pelaksana CHSE Di Bugis Water Park	60
4.3.4	Analisis Karakteristik Bugis Water Park sebagai Organisasi Pelaksana	62
4.3.5	Analisis Komunikasi Antar Organisasi Dinas Pariwisata Dengan Bugis Water Park dan Aktifitas Pelaksana program CHSE	63
4.3.6	Analisis Lingkungan Sosial yang ada Di Bugis Water Park	64
BAB V	73
PENUTUP	73
5.1	Kesimpulan.....	73
5.2	Saran.....	74
DAFTAR PUSTAKA	75
LAMPIRAN	77

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1	Penelitian terdahulu.....	8
Tabel 2. 2	Bagan Kerangka Pikir	24
Tabel 3. 1	Informan.....	30

Tabel 4. 1 Sumber Dinas Pariwisata Kota Makassar **Error! Bookmark not defined.**

Tabel 4. 2 Tenaga Kerja di Bugis Water Park 48



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dinas Parirekreasi dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) bekerja sama dengan Bagian Stabilisasi Publik (BSN) menetapkan Pedoman Umum Indonesia atau SNI dalam rancangan sertifikat Kerapihan, Kesejahteraan, Keamanan dan Pemeliharaan Iklim (CHSE) di bidang perjalanan wisata. bidang industri dan ekonomi imajinatif (Kemenparekraf, 2022).

Akreditasi SNI CHSE merupakan cara yang paling umum untuk memberikan pernyataan kepada organisasi industri perjalanan wisata, organisasi/kantor terkait industri perjalanan lainnya, serta keberatan industri perjalanan rekreasi yang memenuhi pedoman SNI 9042:2021 yang tidak seluruhnya tertuang dalam Konfirmasi SNI CHSE. evaluasi. Sertifikat ini sendiri berfungsi sebagai jaminan kepada pengunjung dan masyarakat bahwa barang dan jasa yang diberikan mengikuti protokol kebersihan, kesejahteraan, keamanan dan kelestarian lingkungan (Kemenparekraf, 2022).

Saat pandemi virus Corona terjadi, beberapa kawasan modern di Indonesia mengalami dampak yang tidak bersahabat. Salah satunya diketahui bahwa industri perjalanan. Sejujurnya, kawasan industri perjalanan merupakan bagian penting dari jenis pendapatan unik kabupaten ini. Berdasarkan informasi dari Bagian Parirekreasi dan Ekonomi Kreatif Indonesia (Kemenparekraf RI), industri parirekreasi menambah PDB (Produk Domestik Bruto) pada masa 2019 sebesar 4,80% atau meningkat 0,30 fokus dari masa sebelumnya. Namun pandemi virus Corona sejak awal hingga tiga bulan pertama masa 2020 ini telah membawa

gangguan terhadap kehidupan manusia yang mengakibatkan terhentinya pergerakan perekonomian di semua negara dan menyebabkan keterpurukan dunia. Industri perjalanan merupakan salah satu wilayah yang paling terkena dampak penyebaran infeksi virus Corona, karena kebijakan pembatasan sosial yang dilakukan oleh otoritas publik, pencoretan acara-acara besar dan pembatasan perjalanan domestik dan internasional telah mematikan aktivitas industri perjalanan.

Oleh karena itu, Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif segera mengambil tindakan dengan membuat rancangan yang diberi nama CHSE (Kerapian (rapiness), Wellbeing (kesejahteraan), Wellbeing (keamanan), dan Climate Supportability (pengelolaan ekologi). Rancangan ini diketahui bahwa fokus pada setiap bisnis industri perjalanan di seluruh wilayah di Indonesia.

CHSE diketahui bahwa rancangan strategi Layanan Industri Perjalanan dan Ekonomi Imajinatif dalam mengatasi permasalahan di bidang industri perjalanan di masa-masa baru pasca pandemi virus Corona, "CHSE diketahui bahwa kerja sama, semua orang bekerja sama. Sebagai tingkat kualitas tertinggi, ini sertifikatnya akan dikoordinasikan dengan Aplikasi Safeguard Peduli," (ungkapan Sandiaga dalam wawancara CNN).

Mengingat untuk membangun kembali kepastian masyarakat lokal dan global untuk melakukan perjalanan dengan aman, tenteram dan kuat akibat pandemi Penyakit Covid 2019, diharapkan kepada pengunjung dan masyarakat bahwa barang dan jasa yang diberikan memenuhi unsur kerapian, iklim kesejahteraan, keamanan dan pengelolaan. (Imam Industri Perjalanan dan Pedoman Ekonomi Kreatif 2020).

Pelayanan Pedoman Industri Perjalanan dan Ekonomi Inventif Masa 2019 pada Bagian I Pengaturan Umum, khususnya Akreditasi Kerapihan, Kesejahteraan, Keamanan dan Pengelolaan Ekologis, yang selanjutnya disebut Afirmasi, diketahui bahwa cara yang paling umum untuk memungkinkan otentikasi pada Organisasi Industri Perjalanan, The Keberatan industri perjalanan dan hal-hal lainnya Industri perjalanan untuk memberikan sertifikasi kepada pengunjung sehubungan dengan pelaksanaan Kerapihan, Kesejahteraan, Keamanan dan Daya Dukung Alam sesuai dengan konvensi dan aturan Kesejahteraan yang ada untukantisipasi dan pengendalian Penyakit Covid 2019.

Dalam proses kerja, pandangan Widodo, proses kerja mengandung makna pemberian sumber daya yang diperlukan untuk menjalankan suatu strategi dan dapat memberikan pengaruh atau hasil terhadap sesuatu.

Proses kerja strategi seringkali bergantung pada faktor riil khusus sebagai tujuan dari permasalahan sosial. Kecenderungan positivistik, situasi pasar, model top down, merupakan faktor nyata yang selalu dilihat dalam setiap proses (penataan) politik. Oleh karena itu, penataan publik pada umumnya menampilkan kegiatan pemerintah yang sungguh-sungguh untuk melayani masyarakat. Pendekatan publik harus dikaitkan dengan permasalahan agregat karena alasan politik, kepentingan, otoritas dan moneter memerlukan mediasi pemerintah dan tidak dapat diselesaikan secara eksklusif.

Dalam situasi unik ini, industri perjalanan merupakan “masalah publik” yang memerlukan kesediaan negara untuk mengelolanya. Untuk menjawab permasalahan dan menjawab kerinduan individu, otoritas publik memberikan strategi dalam bentuk rancangan atau tindakan. Mulai dari rancangan yang fokus

pada kemajuan industri perjalanan, kemajuan industri perjalanan dan menggarap ekonomi kreatif. (Buku Harian Penerapan Kebijakan Kontemporer (JCPA), 1(1), 27-32).

Sementara itu, berdasarkan data Bagian Pengukur Fokus (BPS), jumlah kunjungan pengunjung asing ke Indonesia per Juli 2020 mengalami penurunan sebesar 88,82% jika dibandingkan dengan jumlah kunjungan pada Juni 2019. Selain itu, angka tersebut juga meningkat. juga mengalami penurunan sebesar 2,06% dari bulan Juni 2020. Secara total (Januari-Juni 2020), jumlah kunjungan pengunjung asing ke Indonesia mencapai 3,09 juta kunjungan atau turun sebesar 59,96 persen dibandingkan dengan jumlah kunjungan pengunjung asing pada periode yang sama pada masa 2020. 2019 yang bertambah hingga 7,72 juta kunjungan (BPS, 2020). Sementara pengunjung asing yang datang ke Indonesia melalui seluruh fokus segmen pada Desember 2021 bertambah sebanyak 163.619 kunjungan atau mengalami penurunan sebesar -0,28% dibandingkan Desember 2020 yang bertambah sebanyak 164.079 kunjungan. (Kemenparekraf/Baparekraf, 2021).

Sementara itu, Agen Peningkatan Tujuan dan Kerangka Pelayanan Industri Perjalanan dan Ekonomi Kreatif di laman travel.detik.com memahami bahwa jumlah pengunjung lokal mengalami penurunan sebesar 61% dibandingkan masa sebelumnya. . Penurunan drastis dalam jumlah pengunjung ini sangat mempengaruhi keadaan keuangan karena industri perjalanan mengambil peran penting. dalam meningkatkan gaji negara, perdagangan asing dan peluang kerja yang terbuka. Pandemi ini membahayakan 13 juta pekerja di bidang industri perjalanan dan 32,5 juta spesialis yang berdampak pada bidang industri

perjalanan. (BPS, 2020).

Sementara di Sulsel, Lembaga Pengukuran Fokus mencatat jumlah pengunjung asing di Sulsel sepanjang masa 2020 hanya sebanyak 3.573 kunjungan. Jika dibandingkan dengan kunjungan pengunjung asing pada masa 2019 yang mencapai 17.771 kunjungan, angka tersebut turun hingga 79,90 persen. Kepala BPS Sulsel Yos Rusdiansyah mengatakan rendahnya kunjungan pengunjung asing tidak lepas dari pandemi virus corona. Dampaknya diketahui bahwa dikeluarkannya strategi pembatasan dan penolakan masuk ke Indonesia. "Turun 79,90 persen, hanya sekitar 80%. Sepanjang masa 2020 hanya 3.573 kunjungan. Itu luar biasa biasa," ujarnya dalam penjelasan virtual melalui kanal YouTube, Senin (1/2/2021).

Untuk sementara, titik fokus penelitian ini akan berlokasi di Kantor Pemerintah Daerah Makassar khususnya Dinas Parirekreasi Bagian Makassar dan salah satu lokasi rekreasi Bagian Makassar yaitu Bugis Water Park. Dikutip dari Makassar Sindo News (12 Mei 2021), Bugis Waterpark Experience membatasi jumlah tamu dengan hanya memberi toleransi batasan sebesar 40% dari batasan seluruh wahana bermain. Bugis Waterpark Experience menerapkan sistem aliran masuk-keluar, jika batas dalam ruangan penuh maka tamu dari luar harus stand by. Apabila ada tamu yang keluar, maka tamu lain diperbolehkan masuk (Marhawati Sehe).

Dari audit di atas, para ilmuwan memang harus mengarahkan penelitian untuk mengetahui bagaimana cara menjalankan Rancangan CHSE di bagian Makassar yang merupakan ibu bagian wilayah Sulawesi Selatan, untuk membangun kembali kepastian pengunjung melalui rancangan CHSE itu sendiri.

Penelitian ini menarik karena dapat menggambarkan contoh-contoh upaya yang dilakukan pemerintah daerah Makassar dalam melaksanakan Rancangan CHSE pada objek rekreasi di Bagian Makassar dan terlebih lagi di Bugis Water Park Makassar dengan memanfaatkan spekulasi dan pemikiran yang berkaitan dengan Ilmu Organisasi Negara. Khususnya dalam menjalankan rancangan Open Arrangement.

1.2. Rumusan Masalah

Dalam penelitian ini peneliti merumuskan rumusan masalah yaitu :

Bagaimana implementasi program CHSE sebagai wujud pemenuhan hak wisatawan dalam era new normal di Destinasi wisata Bugis Water Park Kota Makassar ?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan penelitian ini, yaitu untuk mengetahui bagaimana implementasi CHSE, sebagai wujud pemenuhan hak wisatawan dalam era new normal di Destinasi wisata Bugis Water Park di Kota Makassar .

1.4. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah dikemukakan, maka manfaat penelitian ini, adalah:

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memberi manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan terkait konsep atau teori implementasi kebijakan public.

2. Manfaat praktis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan masukan bagi semua pihak khususnya pemerintah terhadap pengimplementasian program kebijakan CHSE di destinasi wisata Kota Makassar dalam konteks pemenuhan hak wisatawan dalam era new normal yang merupakan dampak akibat virus Covid 19 beberapa waktu yang lalu.



BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Penelitian terdahulu

Beberapa hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini, adalah:

Tabel 2. 1 Penelitian terdahulu

No.	Nama	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Saribandaso Tandilino (2020)	“Penerapan Cleanliness, Health, Safety, & Environmental Sustainable (CHSE) Dalam era normal baru pada destinasi pariwisata kota kupang”	tingkat kesesuaian diperoleh nilai kesesuaian antara penilaian kepentingan dan harapan pengelola destinasi pariwisata terhadap penerapan 148 item pelaksanaan protokol CHSE di Kota Kupang sebesar 75%. Hal ini berarti bahwa penilaian pengelola atau pemilik daya tarik wisata tersebut termasuk dalam kriteria Baik dalam penerapan Protokol <i>Cleanliness, Healthy, Safety, & Environmental Sustainable (CHSE)</i> .
2.	Viona Amelia & Danang Prasetyo (2022)	“Sertifikasi CHSE (<i>Cleanliness, Health, Safety & Environment</i>) terhadap Objek Wisata sebagai Wujud Pemenuhan Hak Wisatawan”	penerapan program sertifikasi CHSE telah dilaksanakan sesuai dengan standar. Adapun pemenuhan aspek kesehatan, kebersihan dan keamanan lingkungan cukup mempengaruhi kepuasan wisatawan selama melakukan kegiatan wisata,

			namun penerapan program CHSE ini, bukanlah strategi pamungkas untuk mengembalikan kepercayaan dan meningkatkan kepuasan wisatawan.
3.	Cantika, Vinka Widia (2022)	“Implementasi Cleanliness, Health, Safety, & Environmental Sustainable (CHSE) dalam mendukung pemulihan pariwisata di Kabupaten Sumenep pada masa pandemi covid 19 ”	berdasarkan pada indikator-indikator yang ada. Indikator cleanliness (kebersihan) yang telah diterapkan di Pantai Lombang dan Goa Soekarno seperti tersedianya sarana cuci tangan, tempat sampah yang cukup memadai, serta pembersihan dan kelengkapan toilet bersih. Indikator health (kesehatan) yang telah diterapkan seperti tersedianya termogan untuk cek suhu serta beberapa imbauan secara lisan maupun tulisan bagi para petugas maupun pengunjung untuk taat protokol kesehatan selama berada di lingkungan wisata. Indikator safety (keselamatan) untuk sementara hanya menerapkan ketersediaan titik kumpul dan jalur evakuasi serta media dan mekanisme komunikasi penanganan kondisi. Indikator environmental sustainability (kelestarian lingkungan) juga

			masih belum maksimal diterapkan sebab pengelolaan sampah masih dilakukan dengan cara membakar baik di Pantai Lombang maupun Goa Soekarno,.
--	--	--	--

1. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah sama-sama mengangkat permasalahan dan upaya dalam Penerapan dan implementasi Program CHSE. Sedangkan, perbedaannya jika penelitian terdahulu meneliti di destinasi pariwisata Kota Kupang sedangkan penelitian ini mengambil latar belakang di destinasi pariwisata Kota Makassar yang hanya terfokuskan pada satu objek wisata saja.
2. Persamaan dan Perbedaan penelitian kedua dengan penelitian ini yaitu sama-sama ingin mengetahui dampak dan upaya implementasi CHSE di Destinasi Wisata Daerah masing-masing. Sedangkan, perbedaannya selain perbedaan tempat dan wilayah penelitian terdahulu yang kedua ini lebih memfokuskan peneliti kepada hak & kepuasan para wisatawan.
3. Persamaan penelitian ketiga dengan penelitian ini yaitu masih dalam konteks Implementasi program CHSE. Tapi adapun perbedaannya yang juga masih lebih kepada lokasi penelitian serta beberapa poin fokus penelitian yang ada didalamnya seperti focus dampak dalam implementasi sebagai wujud pemenuhan hak wisatawan di destinasi yang ada di penelitian ini yang tidak ada di penelitian terdahulu ketiga ini yang lebih kepada implementasinya saja.

2.2. Teori dan Konsep

1. Kebijakan Publik

Salah satu definisi mengenai Kebijakan Publik diberikan oleh Robert Eyestone (1971;18), Eyestone mengatakan bahwa secara luas kebijakan publik dapat didefinisikan sebagai “hubungan suatu unit pemerintah dengan lingkungannya”. Kebijakan publik yang menghasilkan peraturan perundang-undangan merupakan bagian dari komoditas politik yang berkaitan dengan kepentingan publik (Alam, 2012). Namun kebijakan publik dapat diperbaiki apabila terjadi dinamika yang berdampak kepada kebijakan tersebut. Oleh sebab itu kebijakan publik bersifat fleksibel yang bisai diperbaiki dan di sesuaikan berdasarkan perkembangan pembangunan. Proses perbaikan dan penyesuaian tersebut dipengaruhi oleh penilaian yang dilakukan masyarakat.

Kebijakan publik tidak akan terlaksana apabila tidak ada proses pelaksanaan kebijakan publik tersebut. Pelaksanaan kebijakan publik merupakan rangkaian tindakan dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan. Proses pelaksanaan kebijakan publik didasari pada mekanisme, sumber daya dan keterkaitan program kebijakan.

Pelaksanaan kebijakan merupakan aktivitas lanjutan dari perumusan dan pengesahan kebijakan (Mutiasari et al, 2016). Maka dapat dimaknai bahwa pelaksanaan kebijakan publik merupakan aktivitas yang dilakukan oleh individu maupun kelompok dalam mencapai suatu tujuan yang didasari oleh kebijakan yang telah disahkan. Dampak dari pelaksanaan kebijakan adalah munculnya konsekuensi dari pelaksanaan kebijakan tersebut. Hasil pelaksanaan kebijakan yang dievaluasi akan mendapatkan hasil yang diharapkan (intended) atau juga

hasil yang tidak diharapkan (spillover negative effect). Maka dapat disimpulkan bahwa setiap kebijakan yang ditetapkan akan memiliki dampak.

2. Implementasi Kebijakan publik

Dalam pembahasan ini peneliti menggunakan Teori Implementasi Kebijakan Van Meter dan Van Horn dalam (Agustino 2016:13). Hasil analisis Implementasi Program Cleanliness, Health, Safety, Environment (CHSE) sebagai wujud pemenuhan hak wisatawan dalam era new normal di Kota Makassar dilihat dari penilaian indikator pada teori Implementasi yang dipengaruhi oleh enam indikator yakni Analisis Standar dan Sasaran, Analisis sumber daya, Analisis karakteristik organisasi pelaksana, analisis sikap pelaksana, analisis komunikasi antar organisasi dan pelaksana, analisis lingkungan sosial.

Menurut Schubert (2002) dalam (Nurdin dan Usman (2002:70) mengemukakan bahwa implementasi adalah sistem rekayasa. Implementasi bermuara pada aktivitas, adanya aksi, tindakan, atau mekanisme suatu sistem. Ungkapan mekanisme mengandung arti bahwa implementasi bukan sekadar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan.

Sedangkan, Majone dan Wildavsky (2004) dalam (Nurdin dan Usman, (2004:70) mengemukakan implementasi sebagai evaluasi. Majone dan Wildavsky mengemukakan bahwa implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan. Pengertian implementasi sebagai aktivitas yang saling menyesuaikan.

Pengertian Implementasi menurut Kadir adalah kegiatan yang dilakukan untuk menguji data dan menerapkan system yang diperoleh dari kegiatan seleksi.

Jadi dapat disimpulkan bahwa implementasi merupakan proses untuk menguji antara konsep dengan konseptual atau antara *text* dan konteks. Selanjtnya menurut fullan implenetasi adalah suatu proses untuk melaksanakan ide, program atau seperangkat aktifitas baru dengan harapan orang lain dapat menerima dan melakukan perubahan.

Situmorang dalam bukunya yang berjudul kebijakan publik, keberadaan implementasi kebijakan merupakan hal yang sangat luas meliputi bagaimana implementasi ditempatkan sebagai alat administrasi hukum dan juga sekaligus dipandang sebagai fenomena kompleks sebuah proses atau hasil dari sebuah kebijakan. Dia juga menegaskan bahwa implementasi merupakan satu dari sekian banyak tahap kebijakan publik dari sekian banyak tahap kebijakan publik, sekaligus menjadi variabel terpenting yang memiliki pengaruh sangat besar terhadap keberhasilan kebijakan terkait penyelesaian isu-isu publik. (Situmorang Ghazali, 2016).

Situmorang juga membahas terkait unsur perubahan yang berkaitan dengan implementasi. Pertama, kebijakan kebijakan yang meyimpang dari tujuan awalnya akan sangat memengaruhi implementasi. Kedua, jumlah perubahan di organisasi akan memengaruhi implementasi. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa perubahan arah tujuan serta reorganisasi pada organisasi terkait sangat akan mempengaruhi proses dan berjalannya sebuah implementasi kebijakan, karna dapat memunculkan tuntutan terhadap struktur dan prosedur.

Sedangkan, Kata “publik” dalam kebijakan publik dapat dipahami ketika dikaitkan dengan istilah “privat”. Istilah publik dapat dirunut dari sejarah negara Yunani dan Romawi Kuno. Bangsa Yunani Kuno mengekspresikan kata publik

sebagai koinion dan privat disamakan dengan idion. Bangsa Romawi Kuno menyebut publik dalam bahasa Romawi res-publica dan privat sebagai res-privata. Dengan menelusuri literatur sejarah Romawi, Gobetti (2007) memilah istilah privat dalam kaitannya dengan individu atau person; sedangkan publik merujuk pada komunitas atau negara. Dalam analisis Gobetti, John Locke termasuk pemikir politik yang lebih menekankan pada kepentingan privat atau individu.

Adapun menurut Thomas Hobbes, pemilahan publik dan privat dalam konteks ruang, dalam praktik kehidupan tidaklah mudah. Saxonhouse (dalam Parsons 2005) menyadari bahwa batas-batas keduanya tidaklah absolut. Hubungan antara ruang publik dengan ruang privat sangat kompleks dan mencerminkan interdependensi. Kepentingan publik dan privat pun bisa saling bertentangan. Untuk memecahkan ketegangan antara kepentingan publik dan privat adalah dengan memasukkan gagasan pasar. Sebagaimana dikemukakan Habermas, bahwa pada awal abad 19, ruang publik yang berkembang di Inggris, berasal dari perbedaan antara kekuasaan publik dan dunia privat.

Adapun kebijakan, Friedrich mengartikan kebijakan sebagai suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan seraya mencari peluang untuk mencapai tujuan atau sasaran yang diinginkan (Widodo 2007:13).

Anderson (dalam Hill and Hupe 2002) memahami kebijakan sebagai serangkaian tindakan yang dilakukan oleh aktor atau sejumlah aktor berkaitan dengan permasalahan yang dihadapi.

Kebijakan berkaitan dengan tindakan. Sebagaimana diungkapkan Suskind, seorang penulis yang dekat dengan pejabat gedung putih masa George W. Bush, “ketika kita melakukan tindakan berarti kita telah membuat suatu realitas dan ketika kita membuat tindakan baru, maka kita juga membuat realitas baru” (Fischer et al (ed). 2007).

Apabila merujuk pada gabungan kebijakan dan publik menjadi satu, yaitu kebijakan publik, memiliki makna yang lebih luas daripada ketika diartikan secara sendiri-sendiri. Kebijakan publik merupakan salah satu komponen negara yang tidak boleh diabaikan. Negara tanpa komponen kebijakan publik dipandang gagal, karena kehidupan bersama hanya diatur oleh seseorang atau sekelompok orang saja, yang bekerja seperti tiran, dengan tujuan untuk memuaskan kepentingan diri atau kelompok saja (Nugroho 2009:11).

Kebijakan publik, termasuk di dalamnya adalah tata kelola 7 negara (governance), mengatur interaksi antara negara dengan rakyatnya. Pertanyaan yang muncul adalah sejauh mana signifikansi kebijakan publik sebagai komponen negara. Seperti dijelaskan Nugroho (2009), setiap pemegang kekuasaan pasti berkepentingan untuk mengendalikan negara, sekaligus juga mengelola negara. Mengelola berarti mengendalikan dengan menjadikannya lebih bernilai. Pemerintah suatu negara dalam mengelola negara, tidak hanya mengendalikan arah dan tujuan negara, tetapi juga mengelola negara agar lebih bernilai melalui apa yang disebut dengan kebijakan publik. Inilah tugas pemerintah atau negara sesungguhnya.

3. Pengertian Program

Halim dan Supomo 2001 (Adisasmita,2011:53) Program merupakan kegiatan satu organisasi dalam jangka panjang dan taksiran jumlah sumber yang akan dialokasikan untuk setiap program, yang umumnya disusun sesuai dengan jenis atau kelompok produk yang dihasilkan. Program kerja karang taruna ialah suatu kegiatan yang akan dilakukan dalam jangka waktu tertentu dan disusun secara terperinci. Di dalam program kerja karang taruna terkandung unsur-unsur berikut:

1. Tingkat persoalan
2. Tujuan
3. Strategi
4. Program kegiatan
5. Hasil yang akan dicapai
6. Jadwal kegiatan

Menurut Hans Hochholzer dalam E Hetzer (2012 : 11), Program merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis, dan terpadu yang dilaksanakan oleh suatu atau beberapa instansi pemerintah dalam rangka kerjasama dengan swasta dan masyarakat guna mencapai tujuan dan sarana yang ditetapkan. Suatu program disusun berdasarkan atas tujuan ataupun target yang ingin dicapai. Susunan perencanaan program-program tersebut disebut sebagai program kerja.

Santosa dalam Soesanto (2011 : 17) program kerja adalah suatu sistem rencana kegiatan dari suatu organisasi yang terarah, terpadu, dan tersistematis yang dibuat untuk rentang waktu yang telah ditentukan oleh suatu organisasi. Program kerja akan menjadi pegangan bagi organisasi dalam menjalankan

rutinitas organisasi. Program kerja juga digunakan sebagai sarana untuk mewujudkan cita-cita organisasi.

Sedangkan, pengertian program kerja adalah program-program yang nyata yang mungkin untuk diimplementasikan untuk mencapai misi perusahaan atau organisasi, Sejalan dengan pandangan di atas, E Hetzer (2012 :13) berpendapat bahwa program kerja adalah aktivitas yang menggambarkan di muka bagian mengenai pekerjaan yang akan dilaksanakan berikut petunjukpetunjuk mengenai cara pelaksanaannya. Aktivitas menggambarkan di muka ini biasanya menyangkut juga jangka waktu penyelesaian, penggunaan material dan peralatan yang diperlukan, pembagian wewenang, dan tanggung jawab serta kejelasan lainnya yang dianggap perlu. Menurut E Hetzer (2012 : 25), setelah ditetapkan target dan tujuan dari program, maka tindakan yang harus diambil dalam program kerja dapat di rinci sebagai berikut:

1. Sarana dan Prasarana Kondisi dan kemampuan semua sarana dan prasarana yang ada, tujuannya untuk mengetahui apakah sarana dan prasarana tersebut masih layak operasi atau tidak, bila masih layak operasi, maka apa saja perbaikan dan penyempurnaan harus dilakukan, untuk menjalankan program 1 tahun kedepan.
2. Metode Semua metode yang digunakan dan proses yang dijalankan untuk menjalankan program kegiatannya.
3. Kemampuan Sumber Daya Manusia Untuk mengetahui kemampuan Sumber Daya Manusia terhadap metode dan proses kerja oleh pimpinan organisasi untuk memenuhi sampai dimana kemampuan anggota dalam melaksanakan pekerjaannya.

4. Semangat Kerja Seorang pimpinan harus mengetahui kondisi pengurus dan sifat bawahan mereka, sehingga seorang pimpinan mampu memberi semangat kerja pada pengurus tentang kebajikan dan sistem imbalan yang mencakup nilai intensif dan penilaian prestasi kerja.

Ada tiga alasan pokok menurut E. Hetzer (2012: 26), mengapa program kerja perlu disusun oleh suatu organisasi :

1. Efisiensi Organisasi Dengan telah dibuatnya suatu program kerja oleh suatu organisasi, maka waktu yang dihabiskan oleh suatu organisasi untuk memikirkan bentuk kegiatan apa saja yang akan dibuat tidak begitu banyak, sehingga waktu yang lain bisa digunakan untuk mengimplementasikan program kerja yang telah dibuat.
2. Efektifitas Organisasi Keefektifan organisasi juga dapat dilihat dari sisi ini, dimana dengan membuat program kerja oleh suatu organisasi maka selama itu telah direncanakan sinkronisasi kegiatan organisasi antara bagian kepengurusan yang satu dengan bagian kepengurusan yang lainnya.
3. Target Organisasi Sebuah program kerja disusun salah satunya karena dilator belakang oleh keinginan untuk mencapai target ataupun tujuan dari sebuah organisasi. dan program kerja merupakan sarana ataupun anak tangga untuk mencapai target ataupun puncak dari tujuan sebuah organisasi.

4. CHSE (*Cleanliness, Health, Safety & Environment Sustainability*)

Dilansir dari Suara.com (27 februari 2021) CHSE adalah program Kemenparekraf yang berupa penerapan protokol kesehatan yang berbasis

pada *Cleanliness* (Kebersihan), *Health* (Kesehatan), *Safety* (Keamanan), dan *Environment Sustainability* (Kelestarian Lingkungan). Penerapan program ini adalah dengan melakukan sertifikasi CHSE untuk para pelaku usaha di industri pariwisata dan ekonomi kreatif, termasuk di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Usaha pariwisata meliputi jasa transportasi wisata, Hotel atau Homestay, Rumah Makan atau restaurant, hingga MICE.
2. Usaha atau fasilitas lain yang terkait meliputi pusat informasi wisata, tempat penjualan cinderamata, toilet umum, dan usaha yang terkait pariwisata lainnya.
3. Lingkungan masyarakat meliputi lingkup administratif seperti Rukun Warga dan Desa yang menjadi bagian dari kawasan wisata atau berdekatan dengan lokasi wisata.
4. Destinasi wisata meliputi seluruh destinasi wisata yang berada dalam lingkup Provinsi: Kota/Kabupaten atau Desa/Kelurahan.

Adapun pengertian CHSE jika dipilah satu persatu sebagai berikut :

- **Cleanlines/Kebersihan** Menurut Hardiana (2018:501) Kebersihan lingkungan mempunyai arti sebuah keadaan bebas dari kotoran, termasuk di antaranya, debu, sampah, dan bau. Kebersihan merupakan upaya manusia untuk memelihara diri dan lingkungannya dari segala yang kotor dan keji dalam rangka mewujudkan dan melestarikan kehidupan yang sehat dan nyaman. Kebersihan merupakan syarat bagi terwujudnya kesehatan, dan sehat adalah salah satu faktor yang dapat memberikan kebahagiaan.

- **Healthy/Sehat** Sehat adalah keadaan tubuh yang normal baik jasmani, rohani, dan sosial, tidak terbatas dari suatu penyakit dan ketidakmampuan atau kecacatan menurut WHO. UU No.36 tahun 2009, yang dimaksud kesehatan dimana kondisi baik secara fisik, mental, spiritual, maupun sosial dimana setiap orang mampu hidup produktif baik sosial maupun ekonominya. Poin ini merupakan bagian dari jaminan kebebasan pengunjung terhadap serangan COVID 19 pada tubuh di setiap destinasi wisata atau usaha yang berkaitan dengan pariwisata.
- **Safety/Keamanan** Keamanan adalah keadaan aman dan tentram (Tarwoto dan Wartonah, 2010).Keamanan tidak hanya mencegah rasa sakit atau cedera, tapi keamanan juga dapat membuat individu aman dalam aktifitasnya, mengurangi stres dan meningkatkan kesehatan umum, sehingga kita bisa menyimpulkan bahwa ketika kita merasa bebas dan tidak dalam keadaan bahaya kita sudah masuk dalam kategori aman. Berdasarkan definisi tersebut keamanan dalam sebuah lingkungan destinasi wisata sangat penting apalagi dalam konteks CHSE sebagai program penekanan penulanan COVID 19 dalam lingkungan pariwisata.
- **Environment Sustainability/kelestarian lingkungan** Pelestarian Lingkungan adalah **proses atau cara perlindungan dari kemusnahan dan kerusakan**. Penataan sumber daya alam yang menjamin pemakaiannya secara berkesinambungan simpanannya yaitu dengan tetap meningkatkan kualitas nilai keanekaragamannya

dan tetap memeliharanya. (BPBD Bogor) 12 juni 2020. Kelestarian lingkungan yang dimaksudkan merupakan perlindungan terhadap lingkungan dan kehidupan didalamnya.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas saya dapat menarik kesimpulan bahwa CHSE merupakan upaya pemerintah dalam menekankan perlindungan secara keseluruhan baik lingkungan maupun kehidupan yang termasuk didalamnya agar terjaga dari berbagai faktor internal maupun external khususnya dalam usaha sektor pariwisata.

5. Sertifikasi CHSE

Apa itu Sertifikasi CHSE ? diliput dari website resmi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) bekerjasama dengan Badan Standarisasi Nasional (BSN) menetapkan Standar Nasional Indonesia atau SNI pada program sertifikasi *Cleanliness, Health, Safety, and Environment Sustainability* (CHSE) di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Sertifikasi SNI CHSE adalah proses pemberian sertifikat kepada usaha pariwisata, usaha/fasilitas lain terkait pariwisata, serta destinasi pariwisata yang memenuhi standar SNI 9042:2021 yang telah ditetapkan dalam penilaian Sertifikasi SNI CHSE.

Sementara itu, perlu diketahui bahwa pelaksanaan sertifikasi dilaksanakan oleh Lembaga Sertifikasi Usaha Pariwisata (LSUP) yang sudah terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN). LSUP ini yang akan menunjuk dan menugaskan Auditor untuk melakukan penilaian terhadap usaha pariwisata yang mengajukan permohonan Sertifikasi SNI CHSE. Sertifikat SNI

CHSE diberikan kepada usaha pariwisata, usaha/fasilitas lain terkait pariwisata, lingkungan masyarakat, dan destinasi pariwisata.

Menurut penulis dari penjelasan kemenparekraf mengenai Sertifikasi CHSE dapat disimpulkan bahwa serifikasi ini merupakan standarisasi untuk usaha yang berkecimpung di dunia pariwisata dalam masa pandemi COVID 19 demi menekan penularan sekaligus memberi rasa nyaman dan rasa aman terhadap konsumen atau pengunjung di suatu objek wisata.

6. Destinasi Wisata

Kotler (2010:29) menjelaskan bahwa destinasi wisata merupakan tempat dengan bentuk yang memiliki batasan nyata atau berdasarkan persepsi, baik berupa batasan secara fisik (pulau), secara politik, atau berdasarkan pasar. Hadinoto (1996:115), destinasi merupakan suatu kawasan spesifik yang dipilih oleh seorang pengunjung dimana dia dapat tinggal selama waktu tertentu. Kata destinasi dapat digunakan untuk suatu kawasan terencana, yang sebagian atau seluruhnya dengan amenities dan pelayanan produk wisata, fasilitas rekreasi, restoran, hotel, atraksi, toko pengecer yang dibutuhkan pengunjung. Menurut peneliti dari konsep di atas destinasi wisata merupakan tempat atau Kawasan berwisata yang memenuhi beberapa syarat penting untuk kenyamanan serta keamanan para pengunjung.

2.3. Kerangka Pikir

Dalam pembahasan ini peneliti menggunakan Teori Implementasi Kebijakan Van Meter dan Van Horn dalam (Agustino 2016:13). Hasil analisis Implementasi Program Cleanliness, Health, Safety, Environment (CHSE) sebagai wujud pemenuhan hak wisatawan dalam era new normal di Kota Makassar dilihat dari penilaian indikator pada teori Implementasi yang dipengaruhi oleh enam indikator yakni :

Tabel 2. 2 Bagan Kerangka Pikir



2.4. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini mengacu pada latar belakang Dibuatnya kebijakan dan proses serta hasil pengimplementasiannya yang kemudian peneliti menjabarkan sesuai dengan teori Implementasi Kebijakan Van Meter dan Van Horn dalam (Agustino 2016:13). Hasil analisis Implementasi Program Cleanliness, Health, Safety, Environment (CHSE) sebagai wujud pemenuhan hak wisatawan dalam era new normal di Kota Makassar dilihat dari penilaian indikator pada teori Implementasi yang dipengaruhi oleh enam indikator yakni analisis standar dan sasaran kebijakan, Analisis sumber daya, Analisis sikap pelaksana, Analisis karakteristik organisasi pelaksana, Analisis komunikasi antar organisasi dan aktifitas pelaksana, Analisis lingkungan sosial.

2.5. Deskripsi fokus penelitian

Adapun poin-poin fokus yang menjadi fokus dalam **Implementasi program CHSE sebagai wujud pemenuhan hak wisatawan Di destinasi wisata Kota Makassar**, yang mengacu pada komponen variable implementasi yang dikemukakan Van Meter dan Van Horn dalam (Agustino 2016:13) . Yaitu ;

1. Analisis Standar dan sasara kebijakan disini saya akan menganalisis bagaimana satandar dan sasaran kebijakan CHSE dengan mengetahui bagaimana standar kebijakannya dari pemerintah dan standarisasi tersebut sudah tepat diimplementasikan di bugis water park Kota Makassar.
2. Analisis sumber Daya Dalam hal ini penulis akan melihat seperti apa sumber daya manusia dan non manusia seperti fasilitas dan sebagainya

yang ada di Bugis Water Park.

3. Analisis karakteristik organisasi pelaksana akan tertuju pada seperti apa karakteristik bugis water park sebagai destinasi wisata wahana perairan dalam implementasi CHSE.
4. Analisis sikap pelaksana ini mengaju kepada orang-orang yang bersangkutan dengan penerapan implementasi CHSE salah satunya setiap karyawan serta pengunjung di Bugis Water Park yang merasakan dampak langsung dalam penerepan kebijakan tersebut.
5. Dalam suatu organisasi publik, pemerintah daerah misalnya, komunikasi sering merupakan proses yang sulit dan kompleks. Analisis ini bermaksud untuk mengetahui komunikasi Dinas Pariwisata dan pihak Bugis Water Park dalam pengimplementasian Program CHSE ini.
6. Analisis Lingkungan Implementasi kebijakan Variabel ini mencakup sumberdaya manusia, dan fasilitas yang dapat mendukung keberhasilan program CHSE (Cleanliness, Health, Safety Environment) ini. Yang dimaksudkan disini adalah bagaimana analisis lingkungan dalam penerapannya kesulitan-kesulitan dalam penerapan CHSE disetiap lingkungan destinasi wisata itu berbeda-beda.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Waktu dan lokasi

Waktu dan lokasi penelitian ini akan dilakukan pada tanggal 31 Agustus 2023 sampai dengan 15 Oktober 2023 dan berlokasi di Dinas Pariwisata Kota Makassar sebagai pemangku kebijakan dan destinasi wisata Bugis Water Park Kota Makassar tepatnya Di Perumahan Bukit Baruga Jl. Sektor Mohameru No.1, Antang, Kecamatan Manggala, Kota Makassar Sulawesi selatan.

3.2. Jenis dan Tipe penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif analitik serta menggunakan penelitian deskripsi. Metode penelitian kualitatif sendiri merupakan metode yang dilakukan secara sistematis dengan mencari dan mengorganisasikan beberapa catatan dari observasi, wawancara, dan sebagainya untuk memahami kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai hasilnya. Untuk memahami hal tersebut analisis harus dilanjutkan dengan mencoba mencari makna.

3.3. Informan dan teknik pengumpulannya

Peneliti menggunakan tehnik purposive sampling yang merupakan penentuan informan yang ditetapkan secara sengaja atas dasar kriteria dan pertimbangan tertentu dan Peneliti telah menentukan beberapa informan yang akan diwawancarai mengenai Imlementasi Program CHSE sebagai pemenuhan hak wisatawan dalam era new normal CHSE di desetinasi wisata Kota Makassar. Adapun informan dalam penelitian yang berjumlah 4 orang, yaitu sebagai berikut:

Tabel 3. 1 Informan

No	Jabatan	Jumlah
1	Dinas Pariwisata Safaruddin, SS (kepala bidang pengembangan destinasi wisata)	1
2	Karyawan Bugis Water Park Anto (supervisor bwp) Dimas (lifeguard bwp) Jamal (Maintenance saran dan prasarana)	3
3	Pengunjung Bugis Water Park	9
4	Jumlah	13

3.4. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini, menggunakan:

1. Wawancara

Wawancara (interview) adalah suatu kejadian atau suatu proses interaksi antara pewawancara (interviewer) dan sumber informasi atau orang yang diwawancarai (interviewee) melalui komunikasi langsung (Yusuf, 2014: 372). Wawancara merupakan instrument yang digunakan untuk menggali data secara lisan. Hal ini harus dilakukan secara mendalam untuk mendapatkan data yang valid dan detail. Pada penelitian ini, peneliti akan melakukan wawancara langsung dengan staf atau pegawai pemerintahan yang berada di kantor pemerintah Kota Makassar atau dinas Pariwisata Kota Makassar, salah satu pengunjung destinasi wisata Bugis Water Park dan salah satu pegawai atau karyawannya. Beberapa alat yang digunakan dalam sesi wawancara yaitu buku, pena dan HP.

2. Dokumentasi

Dokumentasi menurut Sugiyono (2017:124) adalah catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen merupakan catatan atau karya seseorang tentang sesuatu yang sudah berlalu. Dokumentasi akan mengarah kepada bukti konkret. Dilakukan untuk mendapatkan data sekunder dengan cara melakukan kajian terhadap data-data dokumen pribadi dan dokumen resmi baik berupa visual maupun tulisan yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan ataupun pada saat wawancara melakukan kajian terhadap informan guna membenarkan bahwa penelitian ini dilakukan secara sistematis dan sesuai fakta yang ada di lapangan.

3. Observasi

Observasi merupakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap situasi dan proses implementasi yang berada pada objek penelitian. Penelitian ini melakukan observasi yang berupa observasi langsung di salah satu pemangku kebijakan pemerintah Kota Makassar maupun dinas pariwisata Kota Makassar dan di salah satu destinasi wisata kota Makassar yang berfokus di Bugis Water Park Kota Makassar.

3.5. Teknik analisis data

Analisis data diartikan sebagai upaya untuk mendapatkan data yang sudah ada dan kemudian diolah secara statistik, yang dengannya seseorang dapat menjawab rumusan masalah penelitian. Oleh karena itu, teknik analisis data dapat diartikan sebagai suatu jenis analisis data yang tujuannya mengolah data untuk memenuhi rumusan masalah. Maka dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik analisis data yaitu model Miles & Huberman dalam Sugiyono (2017),

dalam tahapan pengumpulan data yaitu:

1. *Data Collecting* (pengumpulan data) merupakan tahap mengumpulkan data dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Dimana peneliti sebagai instrumen kunci dalam pengumpulan data. Makin lama dilapangan makin banyak jumlah data yang di dapatkan dan semakin bervariasi. Terdapat data yang dapat diamati dan data yang tidak dapat diamati misalnya mengenai perasaan dan hati.
2. *Data reduktion* (reduksi data) yaitu memilih dan memfokuskan yang penting dan merangkum data yang pokok. Didalam reduksi data, laporanlaporan lapangan dirangkum, dipilih hal-hal yang pokok, difokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema atau polanya. Jadi laporan lapangan sebagai bahan baku mentah disingkatkan, direduksi, disusun lebih sistematis, sehingga lebih mudah dikendalikan. Data yang direduksi memberikan gambaran yang lebih tajam tentang hasil pengamatan, juga mempermudah peneliti untuk mencari data yang diperoleh bila diperlukan. Reduksi data dapat pula membantu dalam memberikan kode pada aspek-aspek tertentu.
3. *Data Disply* (Penyajian Data) menurut Miles Huberman dalam sugiyono (2017) menyebutkan bahwa yang sering digunakan dalam menyajikan data pada penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Agar peneliti tidak tenggelam oleh kumpulan data oleh karena itu agar dapat melihat gambaran keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dalam penelitian itu, harus diusahakan membuat alat ukur yaitu pedoman wawancara, pedoman observasi dan pedoman dokumentasi.
4. *Klasifikasi Data* (Penarikan Kesimpulan dan klarifikasi) Sejak awalnya

peneliti berusaha untuk mencari makna data yang dikumpulkannya. Untuk itu peneliti mencari tema, pola hubungan, persamaan, hal-hal yang sering timbul, dan sebagainya. Jadi data yang diperoleh dari sejak awal mencoba mengambil kesimpulan. Kesimpulan itu mula-mula masih sangat kabur, diragukan akan tetapi dengan bertambahnya data maka kesimpulan itu akan lebih lengkap jadi kesimpulan senantiasa harus diverifikasi selama penelitian berlangsung hingga akhirnya tercapai kesimpulan akhir.

3.6. Teknik pengesahan data

Salah satu cara yang digunakan oleh peneliti untuk memeriksa keabsahan data adalah pemeriksaan Trianggulasi. Trianggulasi digunakan berdasarkan kebutuhan penelitian yaitu :

1. Trianggulasi sumber, dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber dimaksudkan untuk memverifikasi data yang telah diperoleh dari sumber-sumber yang berbeda, dalam hal ini memperhatikan kedudukan dan kepentingan masing-masing informan.
2. Trianggulasi teknik, dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang mana dengan teknik yang berbeda. Dalam hal ini data yang diperoleh dengan wawancara, lalu dicek dengan observasi dan dokumen. Apabila dengan teknik pengujian kredibilitas data tersebut menghasilkan data yang berbeda-beda, maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan atau yang lain, untuk memastikan data mana yang dianggap benar atau mungkin semuanya benar karena sudut pandangnya berbeda-beda.
3. Trianggulasi waktu, dimaksudkan supaya diperoleh data yang valid dan reliabel berdasarkan pada situasi dan kondisi yang berbeda dari masing-masing

informan. Untuk itu dalam rangka pengujian kredibilitas data dapat dilakukan dengan cara melakukan pengecekan dengan wawancara, observasi atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda. Bila hasil uji menghasilkan data yang berbeda, maka dilakukan secara berulang-ulang sehingga sampai ditemukan kepastian datanya.



BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

4.1.1 Letak Geografis Kota Makassar

Kota Makassar (Macassar, Mangkasar, Ujung Pandang (1971-1999)) adalah salah satu kota metropolitan di Indonesia dan sekaligus sebagai ibu kota provinsi Sulawesi Selatan. Kota Makassar merupakan kota terbesar keempat di Indonesia dan terbesar di Kawasan Timur Indonesia. Sebagai pusat pelayanan di Kawasan Timur Indonesia (KTI), Kota Makassar berperan sebagai pusat perdagangan dan jasa, pusat kegiatan industri, pusat kegiatan pemerintahan, simpul jasa angkutan barang dan penumpang baik darat, laut maupun udara dan pusat pelayanan pendidikan dan kesehatan.

Secara administrasi kota ini terdiri dari 14 kecamatan dan 143 kelurahan. Kota ini berada pada ketinggian antara 0-25 m dari permukaan laut. Penduduk Kota Makassar pada tahun 2000 adalah 1.130.384 jiwa yang terdiri dari lakilaki 557.050 jiwa dan perempuan 573.334 jiwa dengan pertumbuhan rata-rata 1,65 %.

Luas wilayahnya setiap kecamatannya :1 Tamalanrea : 31,84 km²; 2 Biringkanaya 48,22 km²; 3 Manggala 24,14 km²; 4 Panakkukang 17,05 km²; 5 Tallo 5,83 km²; 6 Ujung Tanah 5,94 km²; 7 Bontoala 2,10 km²; 8 Wajo 1,99 km²; 9 Ujung Pandang 2,63 km²; 10 Makassar 2,52 km²; 11 Rappocini 9,23 km²; 12 Tamalate 20,21 km²; 13 Mamajang 2,25 km²; 14 Mariso 1,82 km².

Kota Makassar mempunyai posisi strategis karena berada di persimpangan jalur lalu lintas dari arah selatan dan utara dalam provinsi di Sulawesi, dari wilayah kawasan Barat ke wilayah kawasan Timur Indonesia

dan dari wilayah utara ke wilayah selatan Indonesia. Dengan kata lain, wilayah kota Makassar berada koordinat 119 derajat bujur timur dan 5,8 derajat lintang selatan dengan ketinggian yang bervariasi antara 1-25 meter dari permukaan laut. Kota Makassar merupakan daerah pantai yang datar dengan kemiringan 0 - 5 derajat ke arah barat, diapit dua muara sungai yakni sungai Tallo yang bermuara di bagian utara kota dan sungai Jeneberang yang bermuara di selatan kota. Luas wilayah kota Makassar seluruhnya berjumlah kurang lebih 175,77 Km² daratan dan termasuk 11 pulau di selat Makassar ditambah luas wilayah perairan kurang lebih 100 Km².

Batas-batas wilayahnya adalah:

- Utara: Kabupaten Maros
- Selatan: Kabupaten Gowa
- Barat: Selat Makassar
- Timur: Kabupaten Maros

4.1.2 Visi Misi Dinas Pariwisata Kota Makassar

A. Visi

Terwujudnya Kota Makassar sebagai Destinasi Pariwisata Dunia

B. Misi

1. Peningkatan promosi dan pemasaran Pariwisata yang terarah dan terencana.
2. Penataan dan pengembangan usaha industri Pariwisata dalam meningkatkan daya saing
3. Peningkatan kompetensi dan daya saing SDM pariwisata dan ekonomi kreatif yang berstandar internasional
4. Pengembangan potensi ekonomi kreatif berbasis seni dan budaya

5. Peningkatan kapsista kelembagaan Dinas Pariwisata

Berikut ini destinasi wisata yang terdaftar di dinas pariwisata dan terpantau mulai menerapkan standarisasi CHSE, Bugis Water Park berada di nomor 35;

INFORMASI DESTINASI KOTA MAKASSAR 2023

NO.	DESTINASI WISATA	SEBARAN DESTINASI WISATA (LOKASI)	POTENSI WISATA	SARANA PENUNJANG
WISATA BAHARI				
1	Pulau Samakona	Secara geografis terletak pada 5° 7' 48" Ujung Selatan dan 119° 20' 24" Bujur Timur	Obyek wisata bahari yang berpasir putih dan memiliki keindahan bawah laut	Jalan Setapak, Toilet, Kios Souvenir, Jaringan Komunikasi, Listrik (Genset), Musholla, Landmark
2	Pulau Kodigareng keke	Kel.Kodigareng keke, Kec.Sangkarrang	Obyek wisata bahari yang memiliki pasir putih	Toilet, Jaringan Komunikasi
3	Pulau Lanjuakang	RW Langkai, Kel.Barang Caddi, Kec.Sangkarrang	Obyek wisata bahari yang berpasir putih dan memiliki keindahan bawah laut	Jalan Setapak, Toilet, Listrik (SolarCell), Masjid
34	Lego Lego	Jl.Metro Tanjung Bunga (Kawasan CPI)	Obyek wisata buatan berupa Kawasan berbasis kuliner yang dapat dinikmati warga Kota Makassar. Kawasan ini juga dapat dimanfaatkan pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) untuk mempromosikan produk yang dijual.	Toilet, Listrik, Jaringan Komunikasi, Air Bersih, Masjid, Kios Kuliner
35	Bugis Water Park	Kompleks Perumahan Bukit Baruga, kel.Antang, Kec.Manggala	Obyek wisata buatan berupa wahana permainan air yang juga banyak dikunjungi wisatawan lokal yang tidak hanya berasal dari kota makassar.	Jalan Setapak, Toilet, Listrik, Jaringan Komunikasi, Air Bersih, fasilitas ibadah, Pos Pelayanan Keamanan, kios kuliner
36	RTM Sungai Tello	Bantaran Sungai Tello,	Obyek wisata buatan berupa rumah terapung diatas sungai tello yang menyajikan berbagai makanan dan minuman.	Jalan Toilet, Listrik, Jaringan Komunikasi, Air Bersih, fasilitas ibadah, Kafe dan Resto

4.1.3 Profil Singkat Bugis Water Park

Bugis Waterpark Adventure Makassar dibangun sejak tahun Bugis Waterpark Adventure Makassar dibangun sejak tahun 2011 lalu. Tempat rekreasi ini mengusung perpaduan unik antara konsep alam dengan budaya lokal setempat.

Karena itu, selain berwisata dan bermain air tentu mengajak keluarga dan anak-anak berlibur di tempat ini juga bisa menjadi wisata edukasi budaya dan sejarah. Selain nama tempatnya, beberapa wahana dan atraksi yang ada di tempat ini juga sengaja diberikan istilah khas kedaerahan. Seperti Phinisi Slide, Mappetang, Tappasorong, dan lain sebagainya. Memasuki kawasan Bugis Waterpark Adventure ini Anda akan disambut dengan suasana alami khas pedesaan bugis. Di mana terdapat berbagai bangunan yang terbuat dari kayu dan bambu beratapkan daun rumbia.

Adapun kawasan tempat wisata ini dibagi menjadi 3 zona. Yaitu Zona Kampong Rilau (Kampung Nelayan), Zona Alabuang (pelabuhan), dan Zona Goa Batu Kalibampa (Goa Kupu-kupu). Setiap akhir pekan, ratusan pengunjung dari dalam dan luar Kota Makassar memadatnya.

4.1.4 Visi Misi Dan Tujuan Bugis Water Park

Bugis Waterpark merupakan bagian pengembangan dari Bukit Baruga, salah satu developer properti terbesar di Makassar. Oleh karena itu visi, misi dan tujuan Bugis Waterpark sama dengan Bukit Baruga. Berikut uraiannya:

A. Misi

Menyelenggarakan rekreasi air, dengan kualitas wahana air terbaik, dan sumber daya manusia terlatih, agar menjadi puas, sehingga tercipta nilai bagi stakeholder.

B. Visi

Menjadi tempat rekreasi air terlengkap.

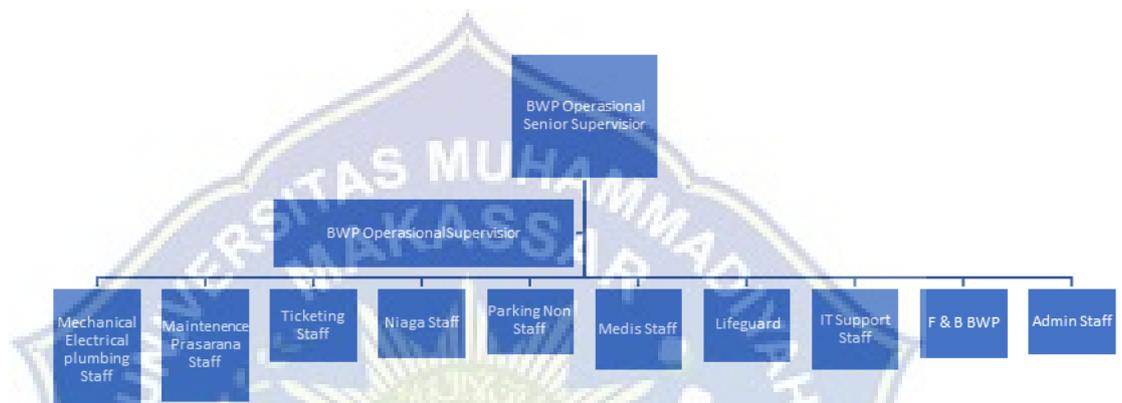
C. Tujuan

- a. Mengutamakan kejujuran, kebersamaan, keikhlasan, setia dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- b. Mengutamakan pelayanan pelanggan dalam kualitas produk dengan semangat inovasi serta pelayanan purna jual.
- c. Mengutamakan pembinaan Sumber Daya Manusia secara berkesinambungan dan terus menerus agar tercipta Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan profesional serta memiliki integritas yang tinggi terhadap perusahaan.
- d. Menghasilkan laba dan aset perusahaan yang tinggi.
- e. Menjaga lingkungan serta peduli pada masyarakat sekitarnya.

4.1.6 Tujuan CHSE

Tujuan CHSE Gratis Penggunaan CHSE ini sebagai jaminan kepada wisatawan dan masyarakat bahwa produk dan pelayanan yang diberikan sudah memenuhi protokol kebersihan, kesehatan, keselamatan, dan kelestarian lingkungan.

4.1.7 Struktur Organisasi Bugis Water Park



Gambar 4. 1 Struktur Organisasi Bugis Water Park

4.1.8 Tugas Pokok Dan Fungsi

- **Operasional Supervisor** Bertugas untuk mengawasi kinerja pegawai serta mengatur suatu proyek yang dijalankan. Dalam hal ini jabatan ini berfungsi sebagai pelaku utama dalam menetapkan alur penerapan CHSE di BWP sekaligus mengevaluasi proses penerapan yang terjadi dilapangan. Sedangkan Fungsinya untuk mengetahui jalan dan dan rencana apa yang harus dilakukan di langkah berikutnya dalam meneruskan program CHSE di Bugis Water Park.

- **Mechanical Electrical Plumbing Staff** Bertugas Untuk mengalirkan aliran listrik untuk jalannya suatu fasilitas yang ada di BWP termasuk suplai air untuk wahana dan fasilitas lainnya.
- **Ticketing Staff** ialah orang yang bertugas dalam penanganan ticket masuk dalam wahan air BWP.
- **Niaga Staff** berfungsi untuk mengurus penjual produk dan periklanan suatu promosi yang ada di BWP.
- **Medis Staff** bertugas untuk menjamin kesehatan setiap pegawainya sebagai salah satu faktor penting dalam interaksi terhadap masyarakat ini sangat berkaitan dengan 2 poin yang ada dalam program CHSE yaitu Healty dan Safety. Bahkan menyediakan pengecekan suhu terhadap pengunjung sbelum memasuki bugis water park pada saat peraturan tersebut masih di berlakukan Pemerintah.
- **Lifeguard** Bertugas untuk melakukan pertolongan pertama apabila terjadi kecelakaan terhadap pengunjung karna perlu kita ketahui bahwa BWP merupakan taman bermain jenis rekreasi air sangat memerlukan penjaga setiap kolam dan wahana serta menjaga kebersihan setiap bagian yang ada di Bugis Water Park sekaligus menjalankan poin Safety atau Cleanlines dari CHSE.
- **IT Support Staff** Berfungsi untuk memastikan semua perangkat teknologi komputer yang ada Bugis Water Park berfungsi dengan baik sekaligus melakukan back up data terhadap setiap program dan data pengunjung yang telah diproses sebelumnya.

- **F & B BWP** Berfungsi dalam penyediaan makanan dan minuman yang ada di Bugis Water Park perlu kita Ketahuin BWP tidak membolehkan Pengunjung membawa makanan dari luar.
- **Admin Staff** bertanggung jawab dalam mengelola dokumen penting Bugis Water Park termasuk mengatur berbagai jenis dokumen baik terkait kontrak, surat menyurat, ataupun dokumen pegawai. Termasuk menerima surat edaran Dinas Pariwisata baik terkait program maupun penyuluhan.

4.2 Hasil Penelitian

4.2.1 Analisis standar dan sasaran kebijakan CHSE di Bugis Water Park

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan mengenai Implementasi Program CHSE (Cleanlines, Healty, Safety, Environment Sustainability) Sebagai Wujud Pemenuhan Hak Wisatawan Dalam Era New Normal Di Destinasi Wisata Kota Makassar . Dalam hal ini dapat di kaitkan dengan 6 indikator yang dikemukakan oleh Van Meter dan Van Horn dalam (Agustino 2016:13) : Analisis standar dan sasaran kebijakan, Analisis sumber daya, Analisis sikap pelaksana, Analisis karakteristik organisasi pelaksana, Analisi komunikasi antar organisasi dan aktifitas pelaksana, Analisis lingkungan Sosial.

Sebelum memasuki pembahasan menggunakan kerangka pikir saya melakukan wawancara mengenai apa itu Program CHSE? kepada Kabag Pengembangan Destinasi Wisata di Dinas Pariwisata dan dia menegaskan bahwa ;

“CHSE sendiri merupakan upaya kemenparekraf yang berupa seruan langsung untuk setiap pelaku usaha di Dinas Pariwisata, perizinan suatu pelaku usaha pariwisata harus memenuhi poin penting CHSE yang berupa Kebersihan, Kesehatan, Keamanan, dan Kelesatarian. Terkait sertifikasinya ada lembaga yang mempunyai tanggung jawab terhadap sertifikasi tersebut yaitu LSUP dan tidak semua mempunyai sertifikat tersebut. Tapi, semua wajib mengimplementasikan program CHSE itu

sendiri dan kami akan terus melakukan komunikasi di setiap destinasi wisata ataupun para pelaku usaha Pariwisata Kota Makassar untuk pengecekan dari penerapan poin penting dari CHSE itu sendiri” (Hasil wawancara dengan SN, 31 Agustus 2023).

Dari hasil wawancara ini penulis dapat mengetahui bahwa Program CHSE tidak sepenuhnya berupa sertifikasi tapi juga proses pengimplementasian nyata dari pihak pelaku usaha pariwisata mengenai poin penting yang ada didalamnya yang menjadi tanggung jawab Dinas Pariwisata setiap Daerah, sedangkan sertifikasinya merupakan tanggung jawab dari LSUP yang merupakan Lembaga Sertifikasi Usaha Pariwisata untuk melakukan sertifikasi di berbagai daerah yang ada di Seluruh Indonesia.

Menurut Van Meter dan Van Horn, Standar dan sasaran kebijakan, pada dasarnya adalah apa yang hendak dicapai oleh program atau kebijakan, baik yang berwujud maupun tidak jangka pendek, menengah atau panjang.

Kejelasan dan sasaran kebijakan harus dapat dilihat secara spesifik sehingga diakhir program dapat diketahui keberhasilan atau kegagalan dari kebijakan atau program yang dijalankan. Standar dan sasaran kebijakan bagaimana standarisasi kebijakan yang akan berdampak kepada sasaran penerapan kebijakan dalam artian bagaimana dampak manfaat yang terjadi dalam jangka pendek, menengah, maupun panjang.

Mengetahui bahwa standar kebijakan dari CHSE itu sendiri adalah poin penting yang terkandung didalamnya yang berupa Kebersihan, Kesehatan, Keamanan, dan Kelestarian Lingkungan. Dan sebagai sasaran dari kebijakan adalah memberikan kepercayaan setiap pengunjung dalam hal pengalaman berlibur yang menyenangkan dan bebas dari rasa was-was terhadap berbagai resiko penyakit ataupun faktor lingkungan dan keamanannya.

Dan ini merupakan standar kebijakan dari poin penting CHSE itu sendiri :

1. Cleanlines Aspek ini mencakup kegiatan mencuci tangan dengan sabun atau memakai penyantasi tangan, menyediakan sarana untuk mencuci tangan, serta membersihkan barang atau ruang publik pakai desinfektan atau cairan lainnya. Selain itu, kriteria lainnya ialah memastikan lokasi bebas dari binatang serta vektor yang berpotensi membawa penyakit, membersihkan toilet, memastikan peralatan toilet lengkap, dan memastikan kebersihan tempat sampah. Dan secara garis besar kebersihan dan kelengkapan Bugis Water park sudah terpenuhi seperti contoh gambar d bawah ini.



2. Healty Aspek ini mencakup tidak menyentuh area wajah, menghindari sentuhan fisik, mencegah kerumunan, menjalankan etika dalam batuk dan bersin, memastikan jarak aman, melakukan cek suhu tubuh, dan memakai APD. Dan untuk saat ini pemakain APD sudah tidak diperlukan lagi.

Selain itu, kriteria tambahan meliputi menyiapkan peralatan kesehatan sederhana, memastikan pengelolaan minuman serta makanan higienis dan

bersih, memastikan sirkulasi udara bagus, serta siap menangani apabila wisatawan mengalami gangguan kesehatan di area wisata.

3. Safety Aspek ini mencakup kesiapan tata cara penyelamatan diri dari bencana, titik kumpul bencana, serta jalur evakuasi dan tersedianya kotak P3K serta alat pemadam kebakaran.

Selain itu, pihak pengelola wajib memiliki media serta mekanisme komunikasi penanganan kondisi darurat serta wajib memastikan peralatan elektronik berada dalam keadaan mati sebelum meninggalkan sebuah ruangan.

4. Environment Sustainability Aspek ini mencakup pemantauan dan evaluasi penerapan panduan serta SOP Pelaksanaan Kebersihan, Kesehatan, Keselamatan, dan Kelestarian Lingkungan.

Kemudian, pihak pengelola harus menggunakan peralatan serta bahan ramah lingkungan, memanfaatkan sumber energi dengan efisien, mengelola limbah cair serta sampah dengan sehat, tuntas, serta ramah lingkungan, serta memastikan keadaan lingkungan sekitar nyaman dan asri.

Dalam Hal ini standar sasaran kebijakan CHSE yang tertuju kepada setiap destinasi wisata dan para pelaku usaha pariwisata yang ada di Indonesia wajib di terapkan sebagai standarisasi dalam pemenuhan hak wisatawan yang sebelumnya telah dikomunikasikan oleh Kemenparekraf kepada setiap daerah melalui Dinas Pariwisata setiap Kabupten/kota. Mengacu pada hal itu Bugis Water Park sebagai salah satu sasaran kebijakan dari program CHSE perlu memenuhi standarisasi program ini. Untuk mengetahui bagaimana standar dan sasaran kebijakan yang ada di Bugis Water Park saya telah melakukan wawancara awal dengan salah satu Kabag di Dinas Pariwisata mengenai

Standarisasi dan Sasaran Kebijakan CHSE di Destinasi Wisata yang ada di Kota Makassar khususnya Bugis Water Park, berikut hasilnya :

“Kita telah melakukan pengenalan standarisasi kebijakan CHSE di setiap destinasi wisata di Kota Makassar yang menjadi sasaran kebijakannya termasuk Bugis Water Park juga tinggal mereka bagaimana mereka melakukan pengimplementasian CHSE” (Hasil wawancara dengan SN, 31 Agustus 2023).

Sementara itu wawancara yang saya lakukan di Bugis Water Park oleh salah satu staff sekaligus supervisor menegaskan bahwa ;

“Sebagai salah satu sasaran kebijakan kami telah melakukan upaya untuk menerapkan segala poin penting yang ada dalam program CHSE tersebut dan akan terus menjaga standarisasi yang telah ditetapkan sebagai bentuk untuk menjaga kepercayaan pengunjung, salah satu melengkapi beberapa fasilitas yang diperlukan walau belum sepenuhnya lengkap sesuai standar yang CHSE perlukan” (Hasil wawancara dengan AT, 15 Oktober 2023).

Untuk mengetahui dampak dari standar dan sasaran kebijakannya saya juga mewawancarai 2 orang pengunjung terkait dengan pengalamannya di Bugis Water Park ;

“Saya juga pertama kali liburan disini dan menurut saya kebersihan dan lingkungan disini membuat kami merasa nyaman dan aman.” (Hasil wawancara dengan AI, 15 Oktober 2023)

“Terkait dengan kenyamanan disini kebetulan saya sudah 2x kesini dan memang lingkungannya dengan perpaduan alam dan wahana air membuat kita nyaman, dan aman dengan fasilitas yang ada disini serta kebersihan yang lumayan.” (Hasil wawan cara dengan SI, 15 Oktober 2023)



Gambar di atas merupakan salah satu contoh gambaran standar kebersihan dan sasaran kebijakan terkait penjagaan jarak dan kebersihan lokasi bagian kolam, dimana terlihat orang-orang tetap tidak terlalu berkerumun dan terlihat kebersihan yang cukup baik dalam kolam tersebut.

Komunikasi yang dilakukan terhadap informan-informan di atas berjalan dengan baik sehingga standar dan sasaran kebijakan akan dapat berdampak baik dan berpengaruh besar dalam pengimplementasian program CHSE yang bertujuan untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap suatu destinasi wisata melalui serangkaian poin CHSE yang menjadi standar dan sasaran kebijakan yang tepat. Dari hasil wawancara ini penulis melihat bahwa standar kebijakan yang tepat dan jelas akan berdampak baik terhadap sasaran atau target kebijakan.

Hal tersebut dilihat dengan jelasnya standar dan sasaran suatu kebijakan akan mempermudah implementasi kebijakan dan program agar terlaksana dengan baik dan sama halnya dengan implementasi CHSE di Bugis Water Park yang dapat terlaksana dengan baik dan memberikan suatu dampak yang begitu besar baik dampak terhadap Bugis Water Park itu sendiri maupun dampak terhadap pengunjung.

Standar dan Sasaran Kebijakan sangat penting diperhatikan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu kebijakan. Karena dengan standar dan sasaran kebijakan yang jelas, akan tercipta suatu dampak yang begitu besar terhadap suatu organisasi.

4.2.2 Analisis Sumber Daya yang ada Di Bugis Water Park Sebagai poin penting dalam pengimplementasian CHSE

Sumber Daya adalah faktor penting untuk implementasi kebijakan agar efektif. Tanpa sumber daya, kebijakan hanya tinggal di kertas menjadi dokumen saja. Sumber daya dalam sebuah implementasi kebijakan menjadi indikator yang penting selain indikator komunikasi. Maka dengan itu diperlukan sumber daya manusia (SDM) yang cukup yang oleh pelaksana kebijakan program CHSE itu sendiri, menurut George C. Edward III dalam Nugroho sumber daya disini dibedakan menjadi dua yaitu sumber daya manusia (staff) dan non manusia (sarana dan prasarna).

Keberhasilan implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Manusia merupakan sumber daya yang terpenting dalam menentukan keberhasilan suatu implementasi kebijakan. Setiap tahap implementasi menuntut adanya sumber daya manusia

yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang diisyaratkan oleh kebijakan yang telah ditetapkan secara apolitik. Selain sumber daya manusia, sumber daya finansial dan waktu menjadi perhitungan penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Derthicks (dalam Van Mater dan Van Horn, 1974) bahwa: "New town study suggest that the limited supply of federal incentives was a major contributor to the failure of the program".

Untuk mengetahui keberhasilan berjalannya suatu program yang baik diperlukan sumber daya dan fasilitas yang cukup. Dalam hal ini Bugis Water Park sebagai pelaksana dari Program CHSE memiliki sumber daya yang cukup baik dari pegawai yang terstruktur dengan baik maupun fasilitas yang memadai dalam artian sumber daya finansial dan waktu juga tergabung didalamnya sebagai pendukung keberhasilan Program CHSE itu sendiri. Dan berikut gambaran tenaga kerja dan fasilitas yang ada di BWP Makassar

Tabel 4. 1 Tenaga Kerja di Bugis Water Park

No	Jabatan Dan Posisi	Jumlah Pegawai
1.	BWP Operation Supervisor	1
2.	Mechanical Electrical Plumbing Staff	8
3.	Maintenance Prasarana Staff	4
4.	Ticketing Staff	1
5.	Niaga Sataff	5
6.	Parking non Staff	-
7.	Medis Staff	-
8.	Lifeguard	18
9.	IT Support Staff	-
10.	F & B BWP	4
11.	Admin Staff	-

Table 6.1 Fasilitas Bugis Water Park

No.	Fasilitas Bugis Water Park
1.	Pintu Masuk Khusus Pengguna Kursi Roda
2.	Toliet dan Kamar Ganti
3.	Restaurant
4.	Gazebo
5	Tempat Sampah dan Alat Pemadam
6	Ruangan khusus bila terjadi kecelakaan

Suatu Destinasi Wisata wajib mempunyai sumber daya yang cukup dan fasilitas yang memadai untuk memuaskan semua pengunjung, dan penulis kembali mewawancarai supervisor operasional yang ada di Bugis Water Park terkait analisis sumberdaya dalam pengimplementasian poin penting CHSE dan berikut hasilnya;

“mengenai sumber daya disini baik sumber daya manusia, alam, dan fasilitas kami disini cukup dalam mendukung dalam penerapan kebijakan CHSE itu sendiri kami baik secara langsung maupun tidak langsung” (hasil wawancara dengan AT, 15 Oktober 2023).

Adapun hasil wawancara kepada pengunjung terkait kualitas sumberdaya yang ada di Bugis water Park ;

“Sumber daya disini baik airnya bersih begitu juga fasilitasnya sangat memadai dan memuaskan pengunjung“ (Hasil wawancara dengan EA, 15 Oktober 2023).

Dari hasil wawancara terhadap dua informan ini penulis dapat mengetahui sumber daya yang baik sangat diperlukan dalam mengimplementasikan suatu kebijakan, dalam hal ini sumber daya yang diperlukan dalam mengimplementasian Program CHSE di Era New Normal itu sendiri adalah para karyawan yang memahami apa itu CHSE dan fasilitas yang mendukung

dalam penerapannya salah satunya toilet yang bersih dan aliran air bersih yang ada di Bugis Water Park itu sendiri.

A. Sumber Daya Manusia (para pegawai BWP)

Setelah meninjau pada tabel yang telah penulis paparkan diatas dapat disimpulkan bahwa semua yang diperlukan dalam mendukung implementasi CHSE sudah cukup dan telah melengkapi poin CHSE baik secara Kebersihan, Kesehatan, Keamanan, dan Kelestarian Lingkungan. Dalam artian semua pegawai sudah memahami terkait standar dari kebijakan CHSE sebagai acuan dalam penerapannya.

B. Sumber Daya Non Manusia (Fasilitas)

Adapun fasilitas sebagai pendukung dalam implementasi CHSE baik itu berupa Toilet, Aliran air yang bersih, dan fasilitas-fasilitas kecil seperti tempat sampah dan sebagainya sudah memadai dalam mendukung upaya implementasi CHSE baik itu dari poin Kebersihan, Kesehatan, Keamanan, dan Kelestarian Lingkungan.

4.2.3 Analisis Sikap Para Pelaksana CHSE di Bugis Water Park

Sikap pelaksana, menunjuk bahwa sikap pelaksana menjadi variable penting dalam implementasi kebijakan. Seberapa demokratis, antusias dan responsive terhadap kelompok sasaran dan lingkungan beberapa yang dapat ditunjuk sebagai bagian dari sikap pelakasana ini.

Hal ini sangat mempengaruhi tingkat keberhasilan suatu program atau kebijakan apabila sikap pelaksana dari suatu kebijakan baik dan dapat memahami apa yang diinginkan dari suatu program dan kebijakan maka dapat dipastikan tingkat keberhasilan suatu kebijakan akan memperoleh dampak dan

nilai yang baik.

Bugis Water Park merupakan salah satu destinasi wisata yang menjadi pelaksana dari Kebijakan CHSE. Maka dari ini penulis ingin mengetahui seperti apa sikap para pelaksana dalam menerapkan poin-poin CHSE sebagai pedoman untuk mengembalikan kepercayaan pengunjung di Era New Normal. Dan penulis melakukan wawancara terhadap pegawai yang menjabat sebagai Lifeguard, Dan ini hasilnya ;

“Kami telah melakukan penjagaan di setiap stage wahana yang ada di Bugis Water Park ini baik itu berupa penjagaan terhadap kebersihan lingkungan dan penjagaan tentang kenyamanan serta keamanan setiap pengunjung” (Hasil wawancara dari DS, 15 Oktober 2023)

Penulis juga kembali mewawancarai dua pengunjung mengenai sikap para pelaksana atau pegawai yang ada disini terkait CHSE, berikut hasilnya ;

“saya baru pertama kali kesini dama anak-anak juga dan orang-orangnya baik dan lumayan ramah dengan adanya penjaga disetiap kolam kami merasa terbantu dan tidak khawatir dengan anak-anak” (Hasil wawancara dengan YI, 15 Oktober 2023). “Kalau secara sikap sih kami merasa aman dengan adanya penjaga disetiap kolam apalagi saya kan bawa anak, tapi mungkin kurang akrab saja sama penjaganya” (Hasil wawancara dengan RN, 15 Oktober 2023).

Terpantau dari gambar dibawah ini para lifeguard dan maintenance sarana dan prasarana menjaga lokasi kerjanya masing-masing dan melakukan komunikasi terhadap pengunjung dengan tetap menjaga jarak kontak fisik.



Dari hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa sikap dari pelaksana yang ada di Bugis Water Park sangat baik terutama dalam penjagaan lingkungan kerja dan keamanan setiap pengunjung hanya saja kurangnya komunikasi antara pengunjung dengan pegawai sehingga ada pengunjung beranggapan bahwa pegawainya cuek ataupun kurang ramah.

4.2.4 Analisis Karakteristik Bugis Water Park sebagai Organisasi Pelaksana

Karakteristik badan pelaksana, menunjuk seberapa besar daya dukung struktur organisasi, nilai-nilai yang berkembang, hubungan dan komunikasi yang terjadi di internal birokrasi. Penulis hanya menekankan karakteristik badan pelaksan yang notabenenya merupaka jenis usaha pariwisata dalam bidang destinasi wisata.

Untuk mendukung proses implementasi suatu program hal yang wajib diketahui adalah karakteristik dari suatu organisasi pelaksana kebijakan. Diketahuiin sebelumnya bahwa Bugis Water Park merupakan desitinasi wisata

berjenis taman rekreasi air yang diisi oleh beberapa wahana air dan kolam.

Dalam menentukan tingkat keberhasilan implementasi CHSE perlu diketahui sebelumnya karakteristik dari destinasi wisata pelaksanaannya telah tertera sebelumnya diatas pembahasan mengenai Struktur Organisasi dan Visi Misinya lengkap dengan fasilitas dan tenaga kerjanya. Yang ingin diketahui penulis disini adalah bagaimana mereka menerapkan poin penting CHSE yang sebenarnya sangat sulit jika ditinjau dari karakteris Bugis Water Park itu sendiri.

Maka dari itu penulis akan memaparkan hasil wawancara dengan supervisor operasional Di Bugis Water Park terkait karakteristiknya sebagai organisasi pelaksana ;

“Kita kan mengetahui bahwa Bugis Water Park ini termasuk destinasi wisata yang mengusung konsep rekreasi air yang menyatu dengan alam. Jadi kami berusaha selalu berkomunikasi terkait penjagaan kebersihan, keamanan, serta kelestarian alamnya dan saya sebagai pengawas selalu menjaga komunikasi terhadap lifeguard dan maintenance sarana dan prasarana agar selalu memperhatikan lingkungan baik dari aliran air yang jernih dan serta kebersihan lingkungan dan keamanan pengunjung di setiap wahana dan kolam” (Hasil Wawancara Dengan Pak AT, 15 Oktober 2023).

Penulis juga kembali melakukan wawancara dengan salah satu pengunjung terkait Kebersihan, Keamanan, Dan Kelestarian Lingkungan Bugis Water Park sebagai 3 dari 4 poin penting CHSE. Berikut hasilnya ;

“Iya bagus kak kami nyaman kan ini wahana air jadi ini sangat bagus semuanya nyaman juga merasan aman juga airnya mengalir bersih bnyak pohonnya dan semua terawat” (Hasil wawancara dengan RYN, 15 Oktober 2023).

Berikut ini gambaran dari atas Bugis Water Par sebagai destinasi wisata berjenis wahana air, dari gambar ini kita dapat melihat bagaimana lingkungan yang tampak dari atas ;



Dari hasil wawancara ini penulis mengetahui implementasi CHSE di Bugis Water Park jika dilihat dari karakteristik atau jenis destinasi wisatanya sangat sulit dalam melakukan penerapan setiap poinnya tpi dengan komunikasi, struktur organisasi, dan fasilitas yang tepat semuanya berjalan lancar dan cukup meyakinkan bagi para pengunjung.

4.2.5 Analisis Komunikasi Antar Organisasi Dinas Pariwisata Dengan Bugis Water Park dan Aktifitas Pelaksana program CHSE

Komunikasi antar badan pelaksana, menunjuk kepada mekanisme prosedur yang dicanangkan untuk mencapai sasaran dan tujuan program. Komunikasi ini harus ditetapkan sebagai acuan, misalnya : seberapa sering rapat rutin akan diadakan, tempat dan waktu.

Komunikasi yang dimaksudkan disini adalah komunikasi antara Dinas Pariwisata dengan Bugis Water Park bagaimana langkah, progres, dan konsistensi dalam pengimplementasian program CHSE komunikasi ini bertujuan untuk mengetahui dampak apa yang telah terjadi di Destinasi Wisata Kota Makassar khususnya Bugis Water Park.

Sebelumnya saya telah melakukan wawancara dengan Kepala Bidang Pengembangan Destinasi Wisata di Dinas Pariwisata Kota Makassar mengenai komunikasi antara Dinas Pariwisata dan Destinasi Wisata Kota Makassar termasuk Bugis Water Park dan berikut hasilnya ;

“Kami telah berkomunikasi sebelumnya dan memberitahu mekanisme terkait apa itu CHSE dan apa tujuan dari Programnya dan salah satunya adalah mengembalikan tingkat kepercayaan pengunjung di era new normal, kami juga akan terus memantau dampak dari implementasi program ini” (Hasil wawancara dengan SN, 31 Agustus 2023)

Terkait Aktifitas Pelaksana (pegawai Bugis Water Park) dalam melakukan tugasnya yang bersangkutan dengan Implementasi CHSE penulis kembali melakukan wawancara dengan salah satu pengunjung di Dinas Pariwisata Kota Makassar, berikut hasilnya;

“Saya melihat kegiatannya mengawasi keadaan disetiap wahana dan kolam yah, itu membuat kami semakin merasa amandan nyaman” (Hasil wawancara dengan LA, 15 Oktober 2023)

Dari dua hasil wawancara tersebut dapat diketahui komunikasi sudah berjalan dengan baik antara Bugis Water Park dan Dinas Pariwisata sehingga implementasi CHSE dapat berjalan sesuai dengan apa tujuan dan dampak apa yang menjadi sasaran, kemudia mengenai aktivitas pelaksana penulis merasa bahwa semua berjalan sesuai dengan apa yang diinginkan pengunjung.

4.2.6 Analisis Lingkungan Sosial yang ada di Bugis Water Park

Lingkungan social, ekonomi dan politik, menunjuk bahwa lingkungan dalam ranah implementasi dapat mempengaruhi kesuksesan implementasi kebijakan itu sendiri. Lingkungan Sosial adalah faktor penting dalam menciptakan dan mengimplementasikan suatu kebijakan, dalam hal ini perlu diketahui bahwa Bugis Water Park berada di Perumahan Bukit Baruga Jl.

Sektor Mohameru No. 1 Antang Manggal Kota Makassar tapi tetap menggunakan konsep menyatu dengan alam sehingga dalam perumahan tempat membutuhkan sekita 6 Hektar lebih untuk mengusung konsepnya dengan rekreasi air yang dikelilingi pepohonan yang rindang seperti didalam hutan.

Dalam hal ini analisis lingkungan sosial perlu diperhatikan oleh Bugis Water Park dalam pelaksanaan Iplementasi CHSE yang berkaitan dengan Kelestarian Lingkungan dan saya sebagai penulis mewawancarai seorang pegawai yang berposisi sebagai maintenance Sarana dan Parasarana, dan ini hasilnya ;

“Menjaga Kelestarian Lingkungan disini pasti ada kendalanya apalagi destinasi wisata ini terletak ditengah perumahan, untungnya pada saat pembangunan tempat ini memiliki 7 hektar lebih lahannya sehingga mudah bagi kami melakukan perawatan dan penjagaan terkait lingkungannya tanpa mengganggu lingkungan sekitar yang merupakan sebagian besar adalah perumahan” (Hasil Wawancara dengan JL, 15 Oktober 2023)

Penulis juga mewawancarai pengunjung terkait pengalamannya dari perjalanannya sampai kesini untuk mengetahui seberapa baiknya lingkungan sosial sekitar sebagai salah satu penilaian implementasi kebijakan CHSE di Bugis Water Park, berikut hasilnya ;

“Baru tahu juga ternyata BWP ada di dalam perumahan dan lingkungan masuknya memang kek lebih berjarak dengan perumahan sekitar” (Hasil wawancara dengan WA, 15 Oktober 2023).

“Memang sih pas masuk agak berjarak jalan aspalnya karena kesini kan jalan bebatuan yang rapi mungkin biar kerasa juga adventurenya, pas masuk disini memang sudah beda kek bukan dalam perumahan lagi” (Hasil wawancara dengan RA, 15 Oktober 2023)

Dan berikut merupakan mini maps Bugis Water Park yang teletak di perumahan baruga



Dari beberapa hasil wawancara diatas penulis menyimpulkan terkait lingkungan sosial yang ada di Bugis Water Park sudah tepat dalam pengimplementasian CHSE bahkan sebelum kebijakan ini dibuat Bugis Water Park sendiri sudah berhasil memenuhi kriteria analisis lingkungan sosial terkait dalam memenuhi poin-poin CHSE jauh sebelum pemerintah mengeluarkan seruan kebijakan ini di setiap Destinasi Wisata di setiap Daerah.

4.3 Pembahasan

4.3.1 Analisis standar dan sasaran kebijakan CHSE di Bugis Water Park

Analisis standar dan sasaran kebijakan merupakan salah satu hal penting yang perlu diperhatikan dalam keberhasilan implementasi kebijakan dalam hal ini standar kebijakan CHSE sudah tepat dalam memenuhi sasaran, tujuan, dan dampak positif kepada setiap destinasi wisata yang ada di Kota Makassar khususnya Bugis Water Park.

Kinerja implementasi kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilannya dari ukuran dan tujuan kebijakan yang bersifat realistis dengan sosio-kultur yang ada di level pelaksana kebijakan. Ketika ukuran dan dan sasaran kebijakan terlalu ideal (utopis), maka akan sulit direalisasikan (Agustino, 2006). Van Meter dan Van Horn (dalam Sulaeman, 1998) mengemukakan untuk mengukur kinerja implementasi kebijakan tentunya menegaskan standar dan sasaran tertentu yang harus dicapai oleh para pelaksana kebijakan, kinerja kebijakan pada dasarnya merupakan penilaian atas tingkat ketercapaian standar dan sasaran tersebut. Dari teori ini penulis memahami bahwa Standar dan Sasara kebijakan dari rprogram CHSE sangat realistis dan mudah dipahami oleh para pelaksana kebijakan dan sangat terlihat bahwa kebijakan ini sangat tepat diberlakukan di berbagai usaha Pariwisata yang ada diseluruh wilayah Indonesia.

Dari hasil penelitian diatas kinerja dalam mengimplementasikan standar kebijakan program CHSE sudah menemui sasaran dengan mengembalikan rasa nyaman dan aman para pengunjung itu berkat standar kebijakan program CHSE yang berupa poin-poin Kebersihan, Keshetan, Keamanan, dan Kelestarian lingkungan dengan pemahaman standar kebijakan yang telah diketahui oleh para pelaksana kebijakan proses Implementasi Program CHSE dalam memenuhi hak wisatawan di era New Normal dapat dikatakan berhasil dikarenakan standar dan sasaran kebijakan yang jelas dan terarah. Walaupun ada dari beberapa fasilitas belum terpenuhi seperti baju APD dan sebagainya.

4.3.2 Analisis Sumber Daya yang ada Di Bugis Water Park sebagai poin penting pengimplementasian CHSE

Sumber Daya adalah faktor penting untuk implementasi kebijakan agar efektif. Tanpa sumber daya, kebijakan hanya tinggal di kertas menjadi dokumen saja. Sumber daya dalam sebuah implementasi kebijakan menjadi indikator yang penting selain indikator komunikasi. Maka dengan itu diperlukan sumber daya manusia (SDM) yang cukup yang oleh pelaksana kebijakan program BPJS itu sendiri, menurut George C. Edward III dalam Nugroho sumber daya disini dibedakan menjadi dua yaitu sumber daya manusia (staff) dan non manusia (sarana dan prasarna).

Keberhasilan implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Manusia merupakan sumber daya yang terpenting dalam menentukan keberhasilan suatu implementasi kebijakan. Setiap tahap implementasi menuntut adanya sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang diisyaratkan oleh kebijakan yang telah ditetapkan secara apolitik. Selain sumber daya manusia, sumber daya finansial dan waktu menjadi perhitungan penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Derthicks (dalam Van Mater dan Van Horn, 1974) bahwa: "New town study suggest that the limited supply of federal incentives was a major contributor to the failure of the program".

Dari dua definisi diatas penulis menemukan hubungan antara sumber daya manusia dan non manusia dengan sumber daya finansial dan waktu sebagai pembahasan dari hasil penelitian yang dikemukakan sebelumnya penulis hanya mengolompokkan sumber daya dari dua pokok saja sumber daya manusia dan non manusia (fasilitas) di Bugis Water Park :

a) Sumber Daya Manusia

Penulis menilai bahwa Sumber Daya Manusia yang ada di Bugis Water Park sudah memenuhi kriteria sebagai salah satu pendukung dalam pengimplementasian semua pegawai sudah memahami standar dari kebijakan dari CHSE dan apa yang akan menjadi tujuan dalam pengimplementasiannya. Baik secara Kualitas dan Kuantitasnya maupun efisiensi waktu dalam memahami apa yang jadi tujuan dan standar dari kebijakan CHSE.

b) Sumber Daya Non Manusia (Fasilitas)

Fasilitas yang ada di Bugis Water Park secara sederhana cukup memadai. Apabila kita melihat dua definisi dari George C. Edward III dalam Nugroho dan oleh Derthicks (dalam Van Mater dan Van Horn, 1974) penulis menyimpulkan Fasilitas yang memadai harus dibarengi dengan sumber daya finansial yang mencukupi dari pihak Bugis Water Park dalam mendukung implementasi CHSE secara fasilitas mereka sudah cukup mendukung pengimplementasiannya dalam artian sumber daya finansial yang dimiliki sudah mencukupi dalam memenuhi fasilitas sebagai faktor penting dalam suatu keberhasilan Program CHSE di Bugis Water Park itu sendiri.

4.3.3 Analisis Sikap Para Pelaksana CHSE Di Bugis Water Park

Menurut pendapat Van Metter dan Van Horn dalam Agustinus (2006): "sikap penerimaan atau penolakan dari agen pelaksana kebijakan sangat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan publik. Hal ini sangat mungkin terjadi karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil formulasi warga setempat yang mengenal betul permasalahan dan persoalan yang mereka rasakan. Tetapi kebijakan publik biasanya bersifat top

down yang sangat mungkin para pengambil keputusan tidak mengetahui bahkan tak mampu menyentuh kebutuhan, keinginan atau permasalahan yang harus diselesaikan”.

Sikap mereka itu dipengaruhi oleh pandangannya terhadap suatu kebijakan dan cara melihat pengaruh kebijakan itu terhadap kepentingan-kepentingan organisasinya dan kepentingan-kepentingan pribadinya. Van Mater dan Van Horn (1974) menjelaskan disposisi bahwa implementasi kebijakan diawali penyaringan (befiltered) lebih dahulu melalui persepsi dari pelaksana (implementors) dalam batas mana kebijakan itu dilaksanakan. Terdapat tiga macam elemen respon yang dapat mempengaruhi kemampuan dan kemauannya untuk melaksanakan suatu kebijakan, antara lain terdiri dari pertama, pengetahuan (cognition), pemahaman dan pendalaman (comprehension and understanding) terhadap kebijakan, kedua, arah respon mereka apakah menerima, netral atau menolak (acceptance, neutrality, and rejection), dan ketiga, intensitas terhadap kebijakan.

Dari definisi diatas terlihat dari kemampuan dan kemauan untuk upaya keberhasilan kebijakan CHSE para pelaksana yang ada di Bugis Water Park sangat mendukung pengimplementasiannya terlihat dari pemahaman, dan pengetahuannya tentang apa itu CHSE menciptakan respon yang menerima sehingga menciptakan sikap yang baik hanya saja karna fokus dalam pemahaman dan pengetahuan dalam kebijakan menciptakan kekurangan pendalaman dalam memerankan diri sebagai pelaksana CHSE dalam melakukan komunikasi lebih dekat terhadap sebagian pengunjung sehingga sebagaian pengunjung mmerasakan miss komunikasi terhadap sikap para

pelaksana di Bugis Water Park. Tapi secara garis besar apa yang dituntut dalam definisi diatas sikap para pelaksana CHSE di Bugis Water Park sudah cukup memadai dalam mendukung keberhasilan pengimplementasiannya

4.3.4 Analisis Karakteristik Bugis Water Park sebagai Organisasi

Pelaksana

Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan organisasi informal yang akan terlibat dalam pengimplementasian kebijakan. Hal ini penting karena kinerja implementasi kebijakan akan sangat dipengaruhi oleh ciri yang tepat serta cocok dengan para agen pelaksananya. Hal ini berkaitan dengan konteks kebijakan yang akan dilaksanakan pada beberapa kebijakan dituntut pelaksana kebijakan yang ketat dan disiplin. Pada konteks lain diperlukan agen pelaksana yang demokratis dan persuasif. Selain itu, cakupan atau luas wilayah menjadi pertimbangan penting dalam menentukan agen pelaksana kebijakan.

Secara garis besar penulis hanya menekankan karakteristik organisasi pelaksana dalam menjalankan suatu kebijakan. Karakteristik organisasi pelaksana sebagai pelaku harus memahami apa yang menjadi acuan suatu kebijakan, dalam artian seperti yang diterangkan didefinisi sebelumnya kecocokan antara organisasi pelaksana dan suatu kebijakan harus tepat dan jelas, berdasarkan hasil penelitian apa yang menjadi acuan Program CHSE bukan hal sulit bagi Bugis Water Park dalam melakukan implementasi CHSE.

Dalam hal ini definisi mengenai analisis karakteristik organisasi pelaksana dari Van Meter dan Van Horn sudah terpenuhi apa lagi meninjau

kebijakan CHSE yang memang diperuntukkan oleh destinasi wisata dan kita ketahui sebelumnya bahwa Bugis Water Park adalah salah satunya.

4.3.5 Analisis Komunikasi Antar Organisasi Dinas Pariwisata Dengan Bugis Water Park dan Aktifitas Pelaksana program CHSE

Agar kebijakan publik bisa dilaksanakan dengan efektif, menurut Van Horn dan Van Mater (dalam Widodo 1974) apa yang menjadi standar tujuan harus dipahami oleh para individu (implementors). Yang bertanggung jawab atas pencapaian standar dan tujuan kebijakan, karena itu standar dan tujuan harus dikomunikasikan kepada para pelaksana. Komunikasi dalam kerangka penyampaian informasi kepada para pelaksana kebijakan tentang apa menjadi standar dan tujuan harus konsisten dan seragam (consistency and uniformity) dari berbagai sumber informasi.

Jika tidak ada kejelasan dan konsistensi serta keseragaman terhadap suatu standar dan tujuan kebijakan, maka yang menjadi standar dan tujuan kebijakan sulit untuk bisa dicapai. Dengan kejelasan itu, para pelaksana kebijakan dapat mengetahui apa yang diharapkan darinya dan tahu apa yang harus dilakukan. Dalam suatu organisasi publik, pemerintah daerah misalnya, komunikasi sering merupakan proses yang sulit dan kompleks. Proses pentransferan berita kebawah di dalam organisasi atau dari suatu organisasi ke organisasi lain, dan ke komunikator lain, sering mengalami gangguan (distortion) baik yang disengaja maupun tidak. Jika sumber komunikasi berbeda memberikan interpretasi yang tidak sama (inconsistent) terhadap suatu standar dan tujuan, atau sumber informasi sama memberikan interpretasi yang penuh dengan pertentangan (conflicting), maka pada suatu saat pelaksana kebijakan akan

menemukan suatu kejadian yang lebih sulit untuk melaksanakan suatu kebijakan secara intensif.

Dalam hal ini Dinas Pariwisata sebagai sumber informasi dalam melakukan penerapan atau implementasi CHSE sudah menyampaikan tentang apa menjadi standar dan tujuan yang konsisten dan seragam, baik dari penyampaian standar suatu kebijakan maupun tujuan yang menjadi sasaran kebijakan CHSE yang ada di Bugis Water Park sehingga konsistensi setiap destinasi wisata dalam melakukan implementasi CHSE dapat berjalan baik.

Sedangkan Bugis Water Park sudah berkomunikasi dengan baik dengan Dinas Pariwisata dalam mengetahui apa yang menjadi standar dan tujuan dari kebijakan CHSE sehingga informasi yang didapatkan jelas dan dapat dicerna dengan baik, maka apabila ditinjau dari definisi sebelumnya komunikasi antara Dinas Pariwisata dan Bugis Water Park untuk menentukan aktivitas pelaksana yang akan dijalankan sebelumnya dapat berjalan dengan baik dan konsisten sesuai dengan apa yang menjadi sasaran dan tujuan suatu kebijakan.

4.3.6 Analisis Lingkungan Sosial yang ada Di Bugis Water Park

Hal terakhir yang perlu diperhatikan guna menilai kinerja implementasi kebijakan adalah sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik. Lingkungan sosial yang tidak kondusif dapat menjadi sumber masalah dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan. Karena itu, upaya implementasi kebijakan mensyaratkan kondisi lingkungan eksternal yang kondusif.

Terkait hal ini penulis membahas hanya fokus pada Bugis Water Park yang letaknya berada dalam perumahan yang dikhawatirkan dapat

mengganggu lingkungan sosial yang ada disekitarnya khususnya kenyamanan masyarakat tapi berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis hal itu sebelumnya sudah diperhitungkan sebelum pembangunan Bugis Water Park bahkan jauh sebelum kebijakan CHSE dibuat.

Dalam hal ini faktor lingkungan sosial sangat penting diperhatikan dalam keberhasilan suatu kebijakan. Apabila melihat lingkungan sosial yang ada Di Bugis Water Park penulis dapat menyimpulkan bahwa dalam implementasi CHSE terkhusus poin Kelestarian Lingkungan Bugis Water Park sudah memenuhi poin yang menjadi acuan Van Meter dan Van Horn dalam keberhasilan kebijakan CHSE sebelumnya. Dikarenakan Bugi Water Park yang sebenarnya letaknya berada ditengah perumahan Bukit Baruga memiliki lahan yang luas sehingga tidak mengganggu lingkungan sosial yang ada disekitarnya.



BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

- a. Standar dan sasaran kebijakan CHSE di Bugis Water Park

Bagaimana implementasi dan Apa yang menjadi Standar dan Sasaran Kebijakan sudah tepat dan dapat terlaksana dengan baik. Hal ini dikarenakan jelasnya standar kebijakan CHSE sehingga dengan mudah dipahami, dan jelasnya juga tujuan sebagai sasaran yang ingin dicapai membuat kebijakan CHSE di Bugis Water Park dapat berjalan dengan cukup baik.

- b. Sumber Daya yang ada Di Bugis Water Park sebagai poin penting pengimplementasian CHSE

Sumber Daya yang ada di Bugis Water Park cukup mumpuni baik dari sumber daya manusianya yang sangat memahami dan mengetahui apa itu kebijakan CHSE memahami seperti apa standar dan sasaran tujuannya. Secara fasilitas Bugis Water Park juga terbilang cukup dan memadai hanya saja mungkin ada penambahan fasilitas yang mungkin bisa lebih mendukung jalannya kebijakan CHSE.

- c. Sikap Para Pelaksana CHSE Di Bugis Water Park

Sikap para Palaksana yang ada di Bugis Water Park juga cukup baik. Dapat mengamalkan setiap poin-poin penting yang terkandung dalam kebijakan CHSE hanya saja mungkin dalam pendalamannya dalam menciptakan kepercayaan dna kenyamanan terhadap sebagian pengunjung diharapkan pegawai lebih sering berkomunikasi dengan pengunjung.

- d. Karakteristik Bugis Water Park sebagai Organisasi Pelaksana

Karakteristik Bugis Water Park sebagai organisasi pelaksana menurut

penulis tidak mengalami kesulitan apa lagi memang kebijakan tersebut diperuntukkan kepada para pelaku usaha pariwisata termasuk destinasi wisata, mungkin hanya menyesuaikan dengan karakteristik destinasinya.

- e. Komunikasi Antar Organisasi Dinas Pariwisata Dengan Bugis Water Park dan Aktifitas Pelaksana program CHSE

Komunikasi Antar Oraganisasi khususnya Dinas Pariwisata dengan Bugis Water Park sudah berjalan dengan baik dengan jelasnya standar dan sasaran dari tujuan kebijakan CHSE sehingga informasi yang Bugis Water Park dapat dipahami dan dijalankan dengan baik dan lancar.

- f. Lingkungan Sosial yang ada Di Bugis Water Park

Lingkungan sosial yang merupakan hal penting dalam melakukan implementasi kebijakan CHSE khususnya Kelestarian Lingkungan sebenarnya sudah terpenuhi dari dulu dengan luasnya lahan dari Bugis Water Park tidak mengganggu lingkungan sosial bermasyarakat yang ada disana.

5.2 Saran

- 1) Pihak Bugis Water Park perlu memberitahu beberapa pegawai agar lebih mendalami sikap komunikasinya dengan pengunjung untuk lebih meningkatkan rasa aman dan nyaman terhadap keseluruhan pengunjung
- 2) Diharapkan Bugis Water Park untuk melengkapi sarana dan prasarana (fasilitas) sesuai dengan satandar kebijakan CHSE.
- 3) Diharapkan kepada pemerintah untuk lebih memantau jalannya standarisasi CHSE di Bugis Water Park

DAFTAR PUSTAKA

- Amelia, Viona Dan Prasetyo, Danang. 2022. "Sertifikasi Chse (Cleanliness, Health, Safety And Environment) Terhadap Objek Wisata Sebagai Wujud Dan Pemenuhan Hak Wisatawan." *Jurnal Manajemen Perhotelan Dan Pariwisata* 5(2).
- Anon. 2019. Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Standar Dan Sertifikasi Kebersihan, Kesehatan, Keselamatan, Dan Kelestarian Lingkungan Sektor Pariwisata Dalam Masa Penanganan Pandemi.
- Anon. N.D.-A. "Journal Of Contemporary Public Administration (Jcpa),." 1(1):27–32.
- Anon. N.D.-B. "Jumlah Kunjungan Wisman Ke Indonesia Bulan Desember 2020 Mencapai 164,09 Ribu Kunjungan." Badan Pusat Statistik. Retrieved (<https://www.bps.go.id/>).
- Cantika, Vinka, Widia. 2022. "Implementasi Cleanliness, Health, Safety, & Environmental Sustainable (Chse) Dalam Mendukung Pemulihan Pariwisata Di Kabupaten Sumenep Pada Masa Pandemi Covid 19."
- Hadinoto, Kususdianto. 1996. *Perencanaan Pengembangan Destinasi Pariwisata*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Hertanti, Siti, Nursetiawan, Irfan, Garvera, R. Rindu & Nurwanda, Asep. 2019. "Pelaksanaan Program Karang Taruna Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Di Desa Cintaratu Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran." *Jurnal Moderat* 6(4).
- Hetzer, E. 2012. *Program Kerja Sebagai Kepuasan Pelayanan*.
- Hupe, Hill &. 2002. *Analisis Kebijakan Publik*.
- I. Zainab1 , Edison2., Fitri Kurnianingsih3. 2022. "Implementasi Program Cleanliness, Health, Safety, Environment Dalam Mendukung Sektor Pariwisata Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kabupaten Bintan."
- Kemenparekraf. N.D. "Pariwisata Siap Dibuka, Sandiaga Ingatkan Chse Dipatuhi." *Cnn Indonesia*.
- Kotler, Philip. 2010. *Manajemen Pemasaran*. Edisi Tiga Belas Bahasa

- Indonesia. Jilid 1 Dan 2. Jakarta. Erlangga.
- Mustika, Syanti. 2020. "Jumlah Wisatawan Nusantara Menyusut 61 Persen." Detik Travel.
- Nugroho. 2011. Pengertian Kebijakan Publik.
- Parsons. 2005. Analisis Kebijakan Publik.
- Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif. 2020. "Peraturan."
- Permatasari, Amanda, Iman. 2020. Kebijakan Public (Teori, Analisis, Implementasi Dan Evaluasi Kebijakan). The Journalish Social And Government.
- Said, Muhammad. 2021. "Kunjungan Wisman Ke Sulsel Anjlok Hampir 80 Persen Di 2020."
- Sari Bandaso Tandilino, S.E., M. .. 2020. "Penerapan Cleanliness, Health, Safety, & Environmental Sustainable (Chse) Dalam Era Normal Baru Pada Destinasi Pariwisata Kota Kupang." Jurnal Tourism 3(2):62–68.
- Situmorang, H., Chazali. 2016. Kebijakan Publik (Teori, Analisis, Implementasi Dan Evaluasi Kebijakan). Social Security Development Institute (Ssdi). Yogyakarta.
- Supomo, Abdul Halim Dan Bambang. 2001. Akuntansi Manajemen, Edisi 1. Jakarta.
- Susanto, A. B. 2011. Reputation-Driven Corporate Social Responsibility Pendekatan Strategik Manajemen Dalam Csr. Jakarta.
- Tandilino, Saribandaso. 2020. "Penerapan Cleanliness, Health, Safety, & Environmental Sustainable (Chse) Dalam Era Normal Baru Pada Destinasi Pariwisata Kota Kupang. Jurnal, Travel, Hospotality, Culture, Destination, And Mice." 3(2).
- Usman, Nurdin &. 2002. Implementasi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam.
- Wartonah, Tarwoto. 2010. Kebutuhan Dasar Manusia Dan Proses Keperawatan. Jakarta.
- Widodo, Joko. 2007. Konsep Dasar Kebijakan Publik.

LAMPIRAN

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH**
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
LEMBAGA PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Jl. Sultan Alauddin No. 259 Telp.866972 Fax (0411)865588 Makassar 90221 e-mail :lp3m@unismuh.ac.id

Nomor : 1715/05/C.4-VIII/VI/1444/2023
Lamp : 1 (satu) Rangkap Proposal
Hal : Permohonan Izin Penelitian

20 Dzulqa'dah 1444 H
09 June 2023 M

Kepada Yth,
Bapak Gubernur Prov. Sul-Sel
Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal & PTSP Provinsi Sulawesi Selatan
di -
Makassar

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Berdasarkan surat Dekan Fakultas Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, nomor: 0882/FSP/A.6-VIII/VI/1444 H/2023 M tanggal 9 Juni 2023, menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini :

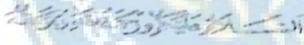
Nama : **MUH ALIF TAUFIK**
No. Stambuk : **10561 1123118**
Fakultas : **Fakultas Sosial dan Politik**
Jurusan : **Ilmu Administrasi Negara**
Pekerjaan : **Mahasiswa**

Bermaksud melaksanakan penelitian/pengumpulan data dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul :

"IMPLEMENTASI PROGRAM CHSE (CLEANLINES HEALTHY, SAFETY, ENVIRONMENT SUSTAINABILITY) SEBAGAI WUJUD PEMENUHAN HAK WISATAWAN DALAM ERA NEW NORMAL DI DESTINASI WISATA KOTA MAKASSAR"

Yang akan dilaksanakan dari tanggal 14 Juni 2023 s/d 14 Agustus 2023.

Sehubungan dengan maksud di atas, kiranya Mahasiswa tersebut diberikan izin untuk melakukan penelitian sesuai ketentuan yang berlaku.
Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan Jazakumullahu khaeran


Ketua LP3M,

Dir. Abubakar Idhan, MP.
NBM 101 7716

06-23



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936
 Website : <http://simap-new.sulselprov.go.id> Email : ptsp@sulselprov.go.id
 Makassar 90231

Nomor : 20386/S.01/PTSP/2023
 Lampiran : -
 Perihal : Izin penelitian

Kepada Yth.
 Walikota Makassar

di-
 Tempat

Berdasarkan surat Ketua LP3M UNISMUH Makassar Nomor : 1715/05/C.4-VIII/II/1444/2023 tanggal 09 Juni 2023 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

Nama : MUH. ALIF TAUFIK
 Nomor Pokok : 105611123118
 Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
 Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa (S1)
 Alamat : Jl. Sultan Alauddin No. 259 Makassar

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka menyusun SKRIPSI, dengan judul :

" IMPLEMENTASI PROGRAM CHSE (CLEANLINES, HEALTHY, SAFETY, ENVIRONMENT SUSTAINABILITY) SEBAGAI WUJUD PEMENUHAN HAK WISATAWAN DALAM ERA NEW NORMAL DI DESTINASI WISATA KOTA MAKASSAR "

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. 03 Juli s/d 03 September 2023

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami *menyetujui* kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
 Pada Tanggal 03 Juli 2023

A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN
 PLT. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
 SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN



Drs. MUH SALEH, M.Si.
 Pangkat : PEMBINA UTAMA MUDA
 Nip : 19690717 199112 1002

Tembusan Yth
 1. Ketua LP3M UNISMUH Makassar di Makassar;
 2. *Pertinggal.*

Nomor: 20386/S.01/PTSP/2023

KETENTUAN PEMEGANG IZIN PENELITIAN :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, kepada yang bersangkutan melapor kepada Bupati/Walikota C q. Kepala Bappelitbangda Prov. Sulsel, apabila kegiatan dilaksanakan di Kab/Kota
2. Penelitian tidak menyimpang dari izin yang diberikan
3. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat
4. Menyerahkan 1 (satu) eksamplar hardcopy dan softcopy kepada Gubernur Sulsel, Cq. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Prov. Sulsel
5. Surat izin akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat izin ini tidak mentaati ketentuan tersebut diatas.

REGISTRASI ONLINE IZIN PENELITIAN DI WEBSITE :
<https://izin-penelitian.sulselprov.go.id>





PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Ahmad Yani Nomor 2, Bulo Gading, Ujung Pandang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90171
 Laman dpmptsp.makassarkota.go.id Pos-el dpmptsp@makassarkota.go.id

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : 070/900/SKP/DPMPTSP/VII/2023

- Dasar :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan Keterangan Penelitian;
 2. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah;
 3. Peraturan Walikota Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Resiko, Perizinan Non Berusaha dan Non Perizinan;
 4. Keputusan Walikota Makassar Nomor 954/503 Tahun 2023 Tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko, Perizinan Non Berusaha dan Non Perizinan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Makassar Tahun 2023;
 5. Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 20386/S.01/PTSP/2023 Tanggal 03 Juli 2023;
 6. Rekomendasi Teknis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar Nomor 070/831-II/BKBP/VII/2023 Tanggal 06 Juli 2023.

DENGAN INI MENERANGKAN BAHWA :

Nama	: MUH. ALIF TAUFIK
NIM / Jurusan	: 105611123118/ Ilmu Administrasi Negara
Pekerjaan	: Mahasiswa (S1) / UNISMUH
Alamat	: Jl. Sultan Alauddin No. 259, Makassar
Lokasi Penelitian	: Dinas Pariwisata Kota Makassar
Waktu Penelitian	: 03 Juli s/d 03 September 2023
Tujuan	: Skripsi
Judul Penelitian	: "IMPLEMENTASI PROGRAM CHSE (CLEANLINES, HEALTHY, SAFETY, ENVIRONMENT SUSTAINABILITY) SEBAGAI Wujud PEMENUHAN HAK WISATAWAN DALAM ERA NEW NORMAL DI DESTINASI WISATA KOTA MAKASSAR"

Dalam melakukan kegiatan agar yang bersangkutan memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Surat Keterangan Penelitian ini diterbitkan untuk kepentingan penelitian yang bersangkutan selama waktu yang sudah ditentukan dalam surat keterangan ini.
2. Tidak dibenarkan melakukan penelitian yang tidak sesuai / tidak ada kaitannya dengan judul dan tujuan kegiatan Penelitian.
3. Melaporkan hasil penelitian kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar melalui email bidangpoldagrikesbangpolmks@gmail.com.
4. Surat Keterangan Penelitian ini dicabut kembali apabila pemegangnya tidak menaati ketentuan tersebut diatas.

Makassar, 11 Juli 2023



Ditandatangani secara elektronik oleh
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA MAKASSAR

A. ZULKIFLY, S.STP., M.Si.

Tembusan, Kepada Yth:
 1. Pimpinan Lembaga/Instansi/Perusahaan Lokasi Penelitian;
 2. Arsip.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Untuk memastikan keaslian tanda tangan elektronik, silakan unggah dokumen pada laman <https://tte.kominfo.go.id/verifyPDF>





PEMERINTAH KOTA MAKASSAR DINAS PARIWISATA

Jl. Urip Sumoharjo No. 58, Makassar 90144. Phone/Fax : 0411 - 424 832
Email : pariwisata@makassarkota.go.id Website <https://explore.makassarkota.go.id>



Makassar, 06 September 2023

Nomor : 6878/DISPAR/007/IX/2023
Lampiran : -
Perihal : **Surat Pengantar Penelitian**

Kepada
Yth. Pimpinan Bugis Waterpark

Di -
Makassar

Dengan Hormat,

Berdasarkan Surat Keterangan Penelitian yang diterbitkan Oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Makassar Nomor : 070/900/SKP/DPMPSTP/VII/2023, serta dalam rangka penyelesaian studi Mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Negara Universitas Muhammadiyah Makassar. Maka dengan ini kami meminta dukungan fasilitasi kegiatan Penelitian di Bugis Waterpark yang dilakukan oleh :

Nama : **MUH. ALIF TAUFIK**
N I M/Jurusan : 105611123118/Ilmu Administrasi Negara
Judul Penelitian : **"Implementasi Program CHSE (Cleanliness, Healthy, Safety, Environment, Sustainability) sebagai wujud pemenuhan hak wisatawan dalam era new normal di destinasi wisata kota Makassar."**

demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih



MUHAMMAD ROEM, S.STP, M.Si

Pangkat : Pembina Tk. I

NIP. 19831110 200212 1 001



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR

DINAS PARIWISATA

Jl. Urip Sumoharjo No. 58, Makassar 90144. Phone/Fax : 0411 - 424 832
 [E : mkssombere@gmail.com] - [T : @mks_sombere] - [W : www.tourism-makassar.id]
 Facebook Fanpage: Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kota Makassar



SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN

Nomor : 10220/DISPAR/008/X/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Roem, S.STP., M.Si
Nip : 19831110 200212 1 001
Pangkat/Gol : Pembina Tingkat I / IV.b
Jabatan : Kepala Dinas Pariwisata Kota Makassar

Menerangkan bahwa mahasiswa(i) di bawah ini :

Nama : Muh. Alif Taufik
NIM / Jurusan : 105611123118/ Ilmu Administrasi Negara
Pekerjaan : Mahasiswa

Telah melaksanakan kegiatan Penelitian di Dinas Pariwisata Kota Makassar pada bulan 03 Juli s.d. 03 September 2023

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

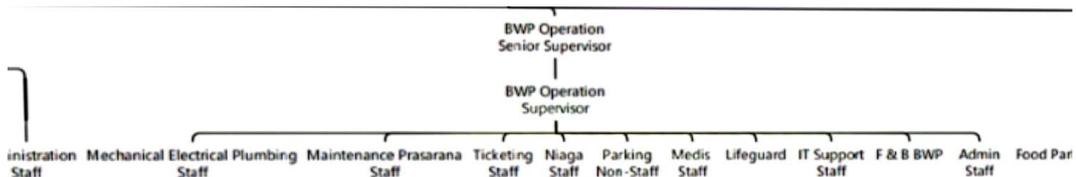
Makassar, 17 Oktober 2023
 Ditandatangani secara elektronik oleh:
 Kepala Dinas Pariwisata



Muhammad Roem, S.STP., M.Si.
 Pangkat : Pembina Tk. I
 Nip : 19831110 200212 1 001



CS Dipindai dengan CamScanner



CS Dipindai dengan CamScanner

